

TUGAS AKHIR - DK184802

ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS LOKASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA BEKASI

GANIDA BIMA GHOFARA 08211640000096

Dosen Pembimbing Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2020



TUGAS AKHIR - DK184802

ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS LOKASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA BEKASI

GANIDA BIMA GHOFARA 08211640000096

Dosen Pembimbing Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2020



FINAL PROJECT - DK184802

DETERMINATION ANALYSIS OF PUBLIC GREEN OPEN SPACE PRIORITY LOCATION IN BEKASI CITY

GANIDA BIMA GHOFARA 08211640000096

Advisor Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.

Department of Urban and Regional Planning Faculty of Civil, Planning, and Geo Engineering Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya 2020

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS LOKASI PENYEDIAAN RTH PUBLIK DI KOTA BEKASI TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota

Pada

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

GANIDA BIMA GHOFARA NRP. 08211640000096

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:

J/mm

Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.

NIP. 196106181989031001

Surabaya, Agustus 2020

ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS LOKASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA BEKASI

Nama Mahasiswa : Ganida Bima Ghofara

NRP : 08211640000096

Departemen : Perencanaan Wilayah dan Kota Dosen Pembimbing : Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 mengenai tata ruang perkotaan, sebuah kota wajibnya memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas wilayah. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat dengan proporsi masing-masing 20% untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat. Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum mencapai 30%, dimana Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 3,57% dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 7,7% (Distaru,2019). Pada tahun 2018 Luas lahan basah hanya tersisa 2,11% dari total luas lahan Kota Bekasi dan cakupan area hutan lindung dan ruang terbuka hijau tersisa 5,26% dari total luas lahan Kota Bekasi (Mantalaen, V, 2020). Dikarenakan perkembangan Kota Bekasi sangat pesat serta Pemerintah Kota Bekasi mengalami kesulitan untuk mencari lokasi yang tepat untuk dilakukan pembangunan ruang terbuka hijau publik. Sehingga penelitian ini betujuan untuk menentukan prioritas lokasi untuk RTH publik di Kota Bekasi.

Tahapan penelitian yang dilakukan guna mencapai tujuan penelitian tersebut adalah menentukan faktor-faktor prioritas

penentuan lokasi RTH publik di Kota Bekasi dengan metode Analytics Hierarchy Process (AHP) terhadap 6 para ahli. Selanjutnya yaitu tahapan menetukan prioritas lokasi berdasarkan skor kesesuaian lokasi dan nilai pembobotan, metode analisis yang digunakan pada tahapan ini adalah Weighted Sum pada GIS.

Hasil dari penelitian ini terdapat lokasi prioritas RTH Publik di Kota Bekasi yang didasarkan dari kesesuaian lokasi dan bobot 8 variabel, lokasi tersebut berada di Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Bantagebang, Kecamatan Jatisampurna dan Kecamatan Jatiasih, dengan total luas yang didapat yaitu, sebesar 860,20 Ha.

Kata Kunci— Kota Bekasi, Prioritas Lokasi, RTH Publik

DETERMINATION ANALYSIS OF PUBLIC GREEN OPEN SPACE PRIORITY LOCATION IN BEKASI CITY

Student's Name : Ganida Bima Ghofara

Student's Number : 08211640000096

Department : Urban and Regional Planning Advisor : Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc.

ABSTRACT

Based on law No. 26 of 2007 on Urban Spatial Planning, a city has a green open space (RTH) at least 30% of the total area. The Green Open Space (RTH) is divided into two, namely the public open green space and private green open space with a proportion of 20% for the public open Space and 10% for private green open space. Bekasi City is one of the areas that green open space has not reached 30%, where the public green open space of 3.57% and privat green open space 7.7% (Distaru, 2019). In 2018 the area of wetlands only remained 2.11% of the total land area of Bekasi city and coverage of protected forest areas and green open space remained 5.26% of the total land area of Bekasi City (Mantalaen, V, 2020). Because the development of Bekasi City is very fast and the government of Bekasi has difficulty to find the right location to do the development of public green open space. So this research aims to determine the location priorities for public RTH in the city of Bekasi.

The stages of research conducted to achieve the research objectives is to determine the priority factors determining the location of public RTH in Bekasi City with the method of Analytics Hierarchy Process (AHP) on 6 experts. Furthermore, the stages of location prioritization based on location conformance scores and weighted results, the analysis method used at this stage is Weighted Sum on GIS.

The results of this study are the priority location of public green open space in Bekasi City related to the suitability of the location and the weight of 8 variables, the location is in Mustika Jaya Subdistrict, Bantagebang Subdistrict, Jatisampurna Subdistrict and Jatiasih Subdistrict, with the total area obtained, amounting to 860.20 Ha.

Keywords— City Bekasi, Location Priority, Public Green Open Space

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah yang diberikan serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Analisis Penentuan Prioritas Lokasi Penyediaan RTH Publik Di Kota Bekasi"

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendampingi penulis dalam penyusunan naskah Tugas Akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

- 1. Kedua Orang tua, ketiga Kakak, dan Keponakan yang selalu memberikan semangat, doa, motivasi, hiburan, serta kasih sayang yang besar.
- Bapak Ir. Putu Rudy Satiawan, M.Sc selaku dosen pembimbing Tugas Akhir atas ilmu yang sangat bermanfaat, saran, masukan, dan kesabaran selama membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 3. Ibu Belinda Ulfa Aulia, ST., M.Sc dan Bapak Prananda Navitas, ST., M.Sc selaku dosen wali selama berkuliah di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota atas bantuan,informasi, dan kesabaran dalam membimbing penulis selama kuliah.
- 4. Bapak Moch Yusuf, ST, MT dan Bapak Surya Hadi Kusuma, ST, MT selaku dosen penguji yang sudah senantiasa memberikan masukan dan arahan terkait tugas akhir ini,
- 5. Seluruh narasumber dan instansi yang telah meluangkan waktunya dan menerima kehadiran penulis untuk mengeksplorasi data yang dibutuhkan.

- 6. Beng-Beng, Himakamdi, Tennis ITS, sudah menemani penulis bermain dan berbagi manis pahitnya kehidupan perkuliahan dari awal hingga akhir perkuliahan ini.
- 7. Aliansi MB4, sudah membantu dan menemani di akhir kehidupan perkuliahan, semoga suatu saat aliansi MB4 bisa jadi penguasa atau pemimpin yang bermanfaat di masa mendatang.
- 8. Ikhfadulhikmy Kurnia, Muhammad Raihan, Astri Karunia Tamara dan seluruh anak bimbingan Pa Rudy, karena sudah membantu memberikan solusi dan semangat terhadap penulis.
- Teman-teman seperjuangan sejak maba Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2016 atau biasa disebut CORAZON
- 10. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Sekian, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wilayah perencanaan serta rekomendasi kedepannya. Penulis menyadari bahwasannya dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat berarti bagi sang penulis. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pembaca.

Surabaya, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBA	AR PENGESAHAN	V
ABSTR	AK	vii
KATA 1	PENGANTAR	xi
DAFTA	R ISI	xiii
DAFTA	R PETA	xvi
DAFTA	R TABEL	xix
DAFTA	R GAMBAR	xxi
BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	3
1.3.	Tujuan dan Sasaran	4
1.4.	Manfaat Penelitian	4
1	.4.1. Manfaat Teoritis	4
1	.4.2. Manfaat Praktis	5
	Ruang Lingkup	
1	.5.1. Ruang Lingkup Wilayah	5
1	.5.2. Ruang Lingkup Substansi	9
	.5.3. Ruang Lingkup Pembahasan	
1.6.	Sistematika Penulisan	9
1.7.	Kerangka Berpikir	10
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1.	Ruang Terbuka Hijau	12
	2.1.1. Fungsi Ruang Terbuka Hijau	
2	2.1.2. Karakteristik RTH	15
2	2.1.3. Jenis Ruang Terbuka Hijau	16
2.2.	\mathcal{L}	
2.3.	Penelitian Terdahulu	20
2.4.	Sintesis Pustaka	26
BAB 3	METODE PENELITIAN	29

3.1.	Pendekatan Penelitian	29
3.2.	Jenis Penelitian	29
3.3.	Variabel Penelitian	30
3.4.	Populasi dan Sampel	33
3.5.	Metode Penelitian	34
	3.5.1. Metode Pengumpulan Data	34
	3.5.2. Metode Analisis	36
3.6.	Tahapan Penelitian	45
3.7.	Kerangka Berfikir	47
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1.	Gambaran Umum Wilayah	49
•	4.1.1. Penggunaan Lahan	53
•	4.1.2. Pusat Kota	57
•	4.1.3. Aksesibilitas	61
•	4.1.4. Kependudukan	67
	4.1.5. Kemiringan Lereng	
	4.1.6. Hidrogeologi	
	4.1.7. Kawasan Rawan Bencana Banjir	
•	4.1.8. Harga Lahan	83
	4.1.9. Ruang Terbuka Hijau Publik Eksisting	
4.2.	Analisis Pembobotan dan Penentuan Skala Prioritas	Faktor
	Penentuan Lokasi RTH Publik	95
4.3.		
	Publik	
	4.3.1. Analisis Penentuan Kesesuaian Lokasi RTH Pul	blik di
	Kota Bekasi	100
	4.3.2. Pembobotan pada lokasi berdasarkan Faktor	
	Publik Kota Bekasi	
	4.3.3. Penentuan prioritas lokasi untuk penyediaan	
	publik di Kota Bekasi	131
BAB 5	KESIMPULAN	136

5.1. Kesimpulan	136
5.2. Rekomendasi	137
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	141
LAMPIRAN I: DESAIN SURVEY PENELITIAN	141
LAMPIRAN II: FORM KUISIONER AHP	146
LAMPIRAN III: ANALISIS STAKEHOLDERS	153
LAMPIRAN III.I: TABEL PENILAIAN STAKEHOLDE	ERS 153
LAMPIRAN IV: FORM HASIL KUISIONER	PARA
STAKEHOLDER	155
LAMPIRAN V	180
LAMPIRAN VI	182
LAMPIRAN VII	184

"Halaman Sengaja Dikosongkan"

DAFTAR PETA

Peta 1.1 Batas Wilayah Studi	7
Peta 4.1 Batas Administratif Kota Bekasi	51
Peta 4.2 Penggunaan Lahan Kota Bekasi	55
Peta 4.3 Penggunaan Lahan Kota Bekasi	
Peta 4.4 Aksesibilitas Kota Bekasi	
Peta 4.5 Kepadatan Penduduk Kota Bekasi	69
Peta 4.6 Kemiringan Lereng Kota Bekasi	
Peta 4.7 Hidorologi Kota Bekasi	
Peta 4.8 Daerah Rawan Banjir Kota Bekasi	81
Peta 4.9 Harga Lahan Kota Bekasi	
Peta 4.10 Persebaran Lokasi RTH di Kota Bekasi	93
Peta 4.11 Kesesuian Bukan Merupakan Kawasan Terbangun .	107
Peta 4.12 Kesesuian Harga Lahan	109
Peta 4.13 Kesesuian Kesesuaian Jarak Terhadap Jalan Arteri .	111
Peta 4.14 Kesesuaian Jarak Terhadap Pusat Kota	113
Peta 4.15 Kesesuaian Kemiringan Lereng	115
Peta 4.16 Kesesuaian Daerah Resapan Air	117
Peta 4.17 Kesesuian Bukan Daerah Rawan Banjir	119
Peta 4.18 Kesesuian Kepadatan Penduduk	121
Peta 4.19 Kesesuaian Lokasi RTH Publik di Kota Bekasi	125
Peta 4.20 Peta Hasil Pembobotan Pada Seluruh Lokasi untu	ık RTH
Publik Kota Bekasi	129
Peta 4.21 Prioritas Lokasi Untuk Penyediaan RTH Publik l	Di Kota
Bekasi	134

"Halaman Sengaja Dikosongkan"

xviii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan	16
Tabel 2.2 Jenis Ruang Terbuka Hijau	16
Tabel 2.3 Penyediaan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk	19
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2.5 Sintesis Pustaka	27
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	31
Tabel 3.2 Identifikasi Stakeholders	34
Tabel 3.3 Skala Preferensi dari Perbandingan Dua Kriteria	38
Tabel 3.4 Matriks Pairwise Comparison	39
Tabel 4.1 Luas Kecamatan Wilayah Studi	49
Tabel 4.2 Penggunaan Lahan Di Kota Bekasi	53
Tabel 4.3 Luas Masing-Masing BWP pada Struktur Ruang	Kota
Bekasi	58
Tabel 4.4 Jaringan Jalan di Kota Bekasi	61
Tabel 4.5 Distribusi Penduduk menurut Kecamatan Kota B	ekasi
Tahun 2019	67
Tabel 4.6 Kemiringan Lahan di Kota Bekasi	71
Tabel 4.7 Data Hidrologi Kota Bekasi	75
Tabel 4.8 Luas Daerah Rawan Bencana Banjir Di Kota Bekasi	79
Tabel 4.9 Penggunaan Data RTH Kota Bekasi	87
Tabel 4.10 Beberapa Dokumentasi RTH Publik di Kota Bekasi	88
Tabel 4.11 Luas Kesesuaian Bukan Merupakan Kawasan Terba	ıngun
	100
Tabel 4.12 Luas Kesesuaian Harga Lahan	101
Tabel 4.13 Luas Kesesuaian Jarak terhadap Jalan Arteri	102
Tabel 4.14 Luas Kesesuaian Jarak Terhadap Pusat Kota	102
Tabel 4.15 Luas Kesesuaian Kemiringan Lereng	103
Tabel 4.16 Luas Kesesuaian Daerah Resapan Air	103
Tabel 4.17 Luas Kesesuaian Bukan Daerah Rawan Banjir	104

Tabel 4.18 Luas Kesesuaian Kepadatan Penduduk	104
Tabel 4.19 Pembobotan Lokasi RTH Publik di Kota Bekasi	127
Tabel 4.20 Klasifikasi Prioritas Lokasi Penyediaan RTH Pu	blik di
Kota Bekasi	132

DAFTAR GAMBAR

"Halaman ini Sengaja dikosongkan"

xxii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ruang terbuka hijau (RTH) kota merupakan bagian penting dari struktur pembentuk suatu kota dimana memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan ekonomi. RTH kota diperlukan dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer dan menunjang kelestarian air dan tanah, ruang terbuka hijau (green open spaces) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.

RTH kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kehidupan manusia sehingga penataan RTH merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan didalamnya. Ketersediaan RTH yang cukup merupakan salah satu usaha mempertahankan kualitas fungsi lingkungan secara optimal. Penataan dan pemanfaatan RTH di perkotaan berbeda dengan di perdesaan. Penataan ruang di perkotaan perlu mendapatkan perhatian khusus guna menciptakan kota yang seimbang. Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh menyebabkan besarnya pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri, transportasi, hotel, serta permukiman. Hal ini umumnya merugikan keberadaan RTH yang sering dianggap sebagai lahan investasi. Lahan yang seharusnya digunakan sebagai RTH dialih fungsikan guna memenuhi fasilitas perkotaan seperti fasilitas sektor perdagangan dan jasa (Siwi. 2016).

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 mengenai tata ruang perkotaan, sebuah kota wajibnya memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayah. RTH yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu RTH publik dan RTH privat dengan proporsi masing-masing 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Penetapan besaran luas RTH ini berdasarkan dari pengembangan RTH kota. Upaya penataan wilayah perkotaan sesuai dengan pengembangan kota akan menciptakan keseimbangan serta keserasian antara lingkungan alam maupun lingkungan buatan atau binaan.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang (dalam Pambudi, 2015) menyebutkan bahwasanya kota-kota di indonesia pada umumnya memiliki kesulitan dalam meningkatkan RTH kota sehingga beberapa kota di indonesia hanya sekedar mempertahankan RTH yang sudah ada walaupun belum memenuhi persentase 30% dari yang diwajibkan. Target untuk memenuhi persentase RTH konon semakin sulit untuk direalisasikan akibat adanya tekanan kebutuhan sarana dan prasarana kota. Seperti struktur bagunan dan pelebaran jalur jalan yang semakin meningkat yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Hal ini merupakan bukti kurang diperhatikannya eksistensi RTH dan bahkan sering dikorbankan. Padahal seharusnya RTH memiliki nilai ekologis maupun ekonomis tinggi bagi terwujudnya lingkungan kota yang sehat.

Kota Bekasi memiliki wilayah yang relatif datar dan berbatasan langsung dengan provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota indonesia. Potensi daerah Kota Bekasi yang tidak memiliki hutan menyebabkan perkembangan kota menuju daerah perdagangan, jasa serta industri.

Karena letak Kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan ibukota,menyebabkan datangnya arus urbanisasi yang signifikan dari masyarakat yang ingin mengadu nasib di ibukota dan ini berdampak pada berkurangnya areal lahan RTH yang dialihfungsikan menjadi pemukiman penduduk yang semakin meluas. Pada tahun 2018 Luas

lahan basah hanya tersisa 2,11% dari total luas lahan Kota Bekasi dan cakupan area hutan lindung dan ruang terbuka hijau tersisa 5,26% dari total luas lahan Kota Bekasi (Mantalaen,V, 2020)

Sehingga Pemerintah Kota Bekasi mengalami kesulitan dalam memenuhi target RTH sebesar 30%, yang terdiri atas 20% RTH publik, dan 10% RTH privat. Kesulitan Pemkot Bekasi memenuhi target RTH 30 persen tidak terlepas dari kondisi geografis Kota Bekasi yang luas wilayahnya hanya 210 kilometer persegi. Hingga pada tahun 2018 RTH Kota Bekasi hanya terealisasi sebesar 11,29%, dimana RTH publik sebesar 3,57% dan RTH privat sebesar 7,72% (DISTARU, 2019). Ruang terbuka hijau dan Ruang publik merupakan isu prioritas dan menjadikan prioritas pembangunan pada Kota Bekasi hingga tahun 2023 (RPJMD Kota Bekasi, 2018-2023).

Dikarenakan perkembangan Kota Bekasi sangat pesat serta Pemerintah Kota Bekasi mengalami kesulitan untuk mencari lokasi yang tepat untuk dilakukan pembangunan ruang terbuka hijau terutama ruang terbuka hijau publik, maka dari itu diperlukan penelitian mendalam terkait penentuan prioritas lokasi yang tepat untuk penyediaan RTH publik Di Kota Bekasi.

1.2. Rumusan Masalah

Luas lahan basah hanya tersisa 2,11% dari total luas lahan Kota Bekasi dan cakupan area hutan lindung dan ruang terbuka hijau tersisa 5,26% dari total luas lahan Kota Bekasi (Mantalaen,V, 2020). Pemerintah Kota Bekasi mengalami kesulitan dalam memenuhi target RTH sebesar 30%, yang terdiri atas 20% RTH publik, dan 10% RTH privat. Kesulitan Pemkot Bekasi memenuhi target RTH 30 persen tidak terlepas dari kondisi geografis Kota Bekasi yang luas wilayahnya hanya 210 kilometer persegi. Hingga pada tahun 2018 RTH Kota Bekasi hanya terealisasi sebesar 11,29%, dimana RTH publik sebesar 3,57% dan RTH privat sebesar 7,72% (DISTARU Kota

Bekasi,2019). Dikarenakan Perkembangan Kota Bekasi sangat pesat serta Pemerintah Kota Bekasi mengalami kesulitan untuk mencari lokasi yang tepat untuk dilakukan pembangunan ruang terbuka hijau terutama ruang terbuka hijau publik, maka dari itu diperlukan penelitian mendalam terkait penentuan prioritas lokasi yang tepat untuk penyediaan RTH publik Di Kota Bekasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut "Bagaimana cara menentukan prioritas lokasi yang tepat untuk penyediaan RTH Publik Di Kota Bekasi?"

1.3. Tujuan dan Sasaran

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas lokasi untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik di Kota Bekasi. Sasaran dalam penelitian ini adalah:

- 1. Merumuskan faktor-faktor utama dalam penentuan prioritas lokasi penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi.
- 2. Menentukan kesesuaian lokasi untuk penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi.
- 3. Menentukan prioritas lokasi untuk penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah pengetahuan khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur untuk fasilitas umum dan menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan lokasi prioritas RTH Publik di Kota Bekasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan wilayah bagi pemerintah Kota Bekasi dalam menentukan lokasi prioritas untuk penyediaan RTH publik. Hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak guna menunjang atau memberikan gambaran awal dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.5. Ruang Lingkup

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang Lingkup wilayah pada penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi yang terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantargebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medansatria, Bekasi Utara. Dengan luas wilayah sebesar 21.049 Hektar.

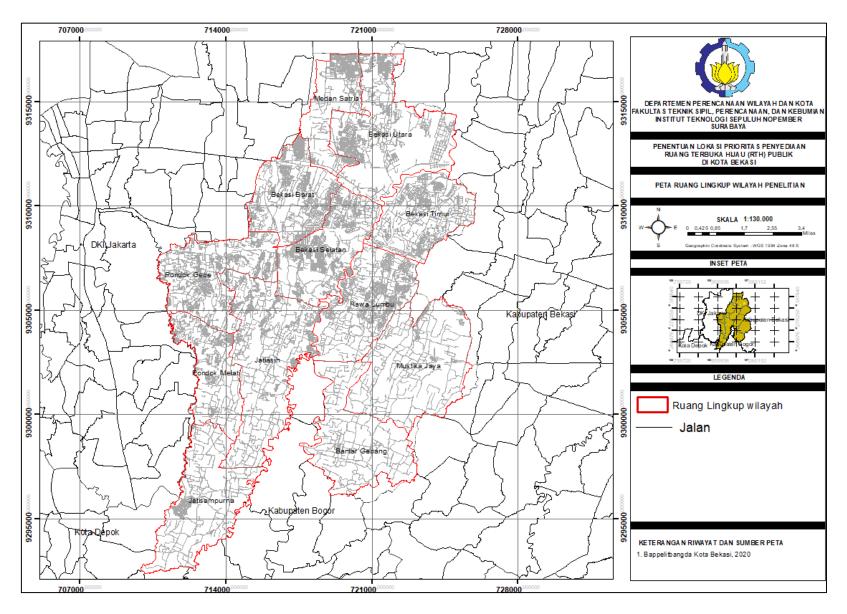
Adapun batas administrasi Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

• Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi

• Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Sebelah Barat : Provinsi DKI JakartaSebelah Timur : Kabupaten Bekasi

"Halaman ini Sengaja dikosongkan"



Peta 1.1 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Sumber: BAPPELITBANGDA Kota Bekasi,2020

"Halaman ini Sengaja dikosongkan"

1.5.2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah terkait faktor-faktor penentuan lokasi RTH publik yang ditinjau dari teoriteori, studi terdahulu, atau pedoman-pedoman dalam penyediaan RTH publik.

1.5.3. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini adalah terkait dengan faktor-faktor apa saja yang tepat dalam menentukan lokasi RTH publik di Kota Bekasi yang selanjutnya menjadi acuan dalam menentukan kesesuaian dan prioritas lokasi penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi dan Bagaimana tahapan pembobotan dapat mempengaruhi proses penentuan prioritas?.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian yang diambil, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian dan manfaat penelitian yang diangkat dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan empiri di tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada Tinjauan pustaka mengandung sintesa untuk menghasilkan variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode tersebut meliputi variabel, teknik mencari data, dan teknik analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi tentang gambaran umum studi berupa data-data penelitian, analisis, dan pembahasan dalam menjawab sasaran dan perumusan hasil akhir yang menjawab tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi hasil penelitian, kesimpulan, serta rekomendasi yang dapat ditinjau untuk menindaklanjuti hasil penelitian.

1.7. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikir penelitian dari latar belakang, tujuan, sasaran, dan hasil penelitian. Berikut merupakan kerangka berpikir dari penelitian ini.

	•UU No.26 Tahun 2007 mengharuskan adanya RTH publik minimal 20% dari luas wilayah
	•RTH publik di Kota Bekasi baru tersedia sebesar 5% dari luas wilayah keseluruhan
Latar Belakang	 Kesulitan mencari lokasi yang tepat, dikarenakan pesatnya perkembangan Kota Bekasi

Rumusan Masalah

•Perlunya penentuan prioritas lokasi penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) Publik

Tujuan dan Sasaran

- •Merumuskan faktor-faktor utama penentuan prioritas lokasi penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi
- •Menentukan kesesuaian lokasi untuk penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi.
- •Menentukan prioritas-prioritas lokasi penyedian RTH publik di Kota Bekasi

Output

•Prioritas Lokasi penyediaan RTH publik Di Kota Bekasi

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Penulis, 2019

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau public merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik mastarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan system mikrolimat, maupun system ekologis lain, yang selanjutnya aka meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau public seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan dapat lebih pemanfaatannnya secara luas oleh masyarakat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang).

Ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuhtumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Pemendagri

No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan).

"Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh factor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralisir udara. Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau 17 juga menerapkan prinsi-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan". (Hamid Shirvani, The Urban Design Process, 1983:16)

2.1.1. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Banyak para ahli menjabarkan mengenai fungsi ruang terbuka hijau, seperti (Shirvani, 1983:93) mengemukakan bahwa fungsi adanya ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

- Sebagai peneduh, pengatur suhu, penyaring udara kotor, pengontrol banjir, angin dan suara serta tempat tinggal binatang.
- b. Sebagai tempat rekreasi dan bermain anak-anak.
- c. Menunjukan tampilan/identitas kota.

Secara umum fungsi ruang terbuka hijau menurut Permendagri No 1 Tahun 2007 menyatakan bahwa fungsi ruang terbuka hijau adalah:

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
- c. Sebagai sarana rekreasi.

- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan dan udara.
- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.
- h. Sebagai pengaturan tata air.

Selanjutnya (Grove, 1983:119) menyatakan bahwa peranan dan posisi tumbuhan di perkotaan tidak hanya bertahan pada fungsi produktifnya yang dipandang dari segi nilai ekonomis, fungsi estetis dan segi arsitektural melainkan juga meluas pada fungsi ekologisnya, seperti:

- a. Perubahan iklim mikro.
- b. Pencemaran udara oleh gas, debu dan kebisingan.
- c. Variasi naik turunnya suhu.
- d. Penyilauan sinar.
- e. Pengikisan tanah/longsor.
- f. Penahan angin yang terlalu kencang.
- g. Pengendali daerah resapan air

Sedangkan menurut Hasni (dalam Astaman,2018), RTH memiliki fungsi edhapis,hidro-orologis, klimatologis, higienis, edukatif, estetis, dan sosial-ekonomi.

- 1. **Fungsi edhapis,** yaitu RTH berfungsi sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik lainnya. Untuk memenuhi fungsi ini harus memperhatikan jenis pohon yang sesuai.
- 2. **Fungsi Hidro-orologis,** yaitu ruang terbuka hijau berfungsi untuk menjaga kelestarian air tanah ataupun daerah resapan air.

Berkaitan dengan penataan ruang suatu perkotaan, RTH juga perlu diperhatikan keberadaannya, karena merupakan bagian penting dari suatu kota. Tentang penataan ruang dijelaskan pula oleh Zulkifli (dalam Angelia 2017) bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan tergantung pada kondisi geomorfologis kota, kebutuhan akan fungsi ekologis RTH, kebutuhan akan fungsi estetika kota dan kebutuhan pereduksi landscape disaster (longsor, banjir, angin puting beliung), serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota dan wilayah sekitar dalam rangka mewujudkan kota berkelanjutan.

2.1.2. Karakteristik RTH

Ketentuan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi secara ekologis dan fungsional didadasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau dibedakan karakteristiknya dengan tipologi berdasarkan fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikannya secara fisik RTH dapa dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat bersifat ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (memanjang, mengelompok, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi

kepemilikan, RTH dapat dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

Tabel 2.1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang	RTH	Ekologis	Pola	RTH Publik
Terbuka	Alami	Budaya	Ekologis	KIH Publik
Hijau (RTH)	RTH Non	Estetika	Pola	RTH Privat
(====)	Alami	Ekonomi	Planologis	111111111111111111111111111111111111111

Sumber: Permen PU Nomor 5/PRT/M/2008

Berdasarkan tipologi di atas, penambahan prioritas Ruang Terbuka Hijau didalam penelitian ini difokuskan pada penyediaan RTH alami secara fisik , dengan fungsi ekologis, struktur pola ekologis, dan didorong kepemilikannya sebagai RTH publik , jenis RTH berdasarkan kepemilikannya sebagai RTH publik yaitu RTH Taman Kota dan Hutan Kota, RTH Jalur hijau jalan, dan RTH dengan fungsi tertentu.

2.1.3. Jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis RTH menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jenis Ruang Terbuka Hijau

		Kepemilikan	
Jenis	Skala/Lokasi	RTH	RTH
		Publik	Privat
RTH	Pekarangan rumah		,
Pekarangan	tinggal		>

		Kepe	milikan
Jenis	Skala/Lokasi	RTH	RTH
		Publik	Privat
	Halaman perkantoran,		
	pertokoan, dan tempat		✓
	usaha		
	Taman atap bangunan		✓
	Taman RT	✓	✓
	Taman RW	✓	✓
RTH Taman	Taman Kelurahan	✓	✓
dan Hutan	Taman Kecamatan	✓	✓
Kota	Taman Kota	✓	
	Hutan Kota	✓	
	Sabuk Hijau (Green	✓	
	Belt)		
	Pulau jalan dan median	./	./
RTH Jalur	jalan	•	•
Hijau	Jalur pejalan kaki	✓	
Tijuu	Ruang dibawah jalan	√	
	layang	V	
	RTH Sempadan Rel	1	
	Kereta Api	•	
RTH Fungsi	Jalur Hijau Jaringan	√	
Tertentu	listrik tegangan api		
	RTH sempadan sungai	✓	
	RTH sempadan pantai	√	

		Кере	milikan
Jenis	Skala/Lokasi	RTH	RTH
		Publik	Privat
	RTH Pengamanan		
	sumber air baku/mata	✓	
	air		
	Pemakaman	✓	

Sumber: Permen PU No.5 Tahun 2008

2.2. Kriteria Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Distribusi/penyediaan ruang terbuka hijau publik juga harus disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan penyediaan RTH dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, 20% terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

2. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita. Berikut adalah tabel ketentuan penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk:

Tabel 2.3 Penyediaan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk

Unit Lingkun gan (jiwa)	Tipe RTH	Luas Min/ Unit (m²)	Luas Min/ Kapita (m²)	Lokasi
250	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2.500	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
30.000	Taman keluraha n	9.000	0,3	Dikelom-pokkan dengan sekolah/ pusat kelurahan
120.000	Taman kecamata n	24.000	0,2	Dikelom-pokkan dengan sekolah/ pusat kecamatan
	Pemaka- man	disesuaika n	1,2	Tersebar
	Taman kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/ kota
480.000	Hutan kota	disesuaika n	4,0	Di dalam/ kawasan pinggiran
100.000	Untuk fungsi- fungsi tertentu	disesuaika n	12,5	Disesuai-kan dengan kebutuhan

Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008

3. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak teganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau

sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

2.3. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa studi yang berhubungan dalam penyediaan lokasi untuk RTH publik, diantaranya adalah:

Achsan (2015) menyebutkan kriteria penentuan lokasi pengembangan RTH terbagi dalam 5 kriteria, yaitu kemiringan lereng, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, aksesibilitas dan sarana pendukung. Kriteria kemiringan lereng dibagi kedalam tiga sub kriteria vaitu sub kriteria kemiringan lereng 0-8%, sub kriteria kemiringan lereng 8-15% dan sub kriteria kemiringan lereng > 15%, kriteria penggunaan lahan dibagi kedalam empat sub kriteria yaitu sub kriteria kawasan ruang terbuka hijau, sub kriteria kawasan perdagangan, sub kriteria kawasan permukiman dan sub kriteria area penggunaan lain. Kriteria kepadatan penduduk dibagi kedalam tiga sub kriteria yaitu kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, kawasan dengan kepadatan penduduk sedang dan kawasan dengan kepadatan penduduk rendah. Kriteria aksesibilitas dibagi kedalam tiga sub kriteria yaitu jarak 200 m dari jalan arteri, jarak 400m dari jalan arteri dan jarak > 400 m dari jalan arteri. Kriteria sarana pendukung dibagi kedalam tiga sub kriteria yaitu jarak 500 m dari pusat kota, jarak 1000 m dari pusat kota dan jarak > 1000 m dari pusat kota.

Humaida (2016) dalam penelitiannya menggunakan data Landsat 8 untuk membantu mendapatkan beberapa data spasial. Aspek biologi yang diukur antaranya analisis penutupan lahan (*land cover*) dan indeks vegetasi. Indeks

vegetasi (NDVI) menggambarkan nilai kerapatan dan kehijauan biomassa sehingga daerah dengan nilai NDVI rendah (lahan kosong,lahan terbangun, rumput, dan semak belukar dengan kisaran nilai NDVI (0-0,3) akan diputuskan sebagai daerah prioritas RTH. Indeks kenyamanan (THI) digunakan sebagai aspek fisik yang terukur menggantikan suhu permukaan untuk mendeteksi fenomena pualu bahang kota karena menggambarkan pengaruh suhu udara dan kelembapan terhadap kenyamanan manusia. Faktor kepadatan penduduk sebagai aspek sosial terukur ditambahkan karena fenomena pulau bahang kota cenderung ditemukan di kawasan urban yang padat penduduk. Nilai tanah sebagai bagian dari aspek ekonomi digunakan untuk memperkirakan nilai lokasi prioritas ruang terbuka hijau yang akan dibeli serta untuk menggambarkan nilai opportunity cost (biaya kesempatan) suatu area jika dikonsersi menjadi ruang terbuka hijau daripada peruntukan lain dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dan penelitian ini, hasil aspek diharapkan overlav dari semua tidak menggambarkan fenomena pulau bahang kota berdasarkan karakteristik tutupan lahan, tetapi juga dapat menggambarkan prioritas kebutuhan suatu wilayah perkotaan akan ruang terbuka hijau sebagai solusi untuk mendinginkan suhu udara perkotaan akibat pulau bahang kota.

Setiawan dan Pigawati (2014) menyatakan bahwa Pencemaran udara mempengaruhi kualitas tingkat kenyamanan suatu daerah. Ruang terbuka hijau semakin berkurang dan prioritas adanya ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota berkembang di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis prioritas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Serengan Kota Surakarta sehingga mengurangi polusi udara dan menjaga tingkat

kenyamanan permukiman. Dalam penentuan prioritas menggunakan pramater antara lain penggunaan lahan, kepadatan bangunan, kerapatan vegetasi, suhu dan kelembapan, dan jarak antar jalan utama.

Sementara itu, berdasarkan buku manual pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 2017, ada beberapa kriteria pemilihan lokasi RTH, yaitu:

- Lahan adalah milik Pemda, dibuktikan dengan sertifikat hak milik dan diperkuat dengan SK Penetapan oleh Bupati/Walikota;
- Lokasi yang ditunjuk masuk dalam kriteria kawasan hijau baik dalam RTRW maupun dalam Masterplan Kota Hijau;
- Bukan termasuk RTH existing karena ketentuannya adalah penambahan luasan RTH, bukan beautifikasi taman existing;
- Merupakan lahan yang sudah siap dikerjakan (clean and clear) tidak perlu pengurukan atau pengerukan kecuali pembentukan muka tanah;
- Bukan merupakan lahan produktif seperti sawah, kebun dan lain sebagainya;
- Bukan merupakan kawasan rawan bencana, bebas banjir dan longsor;
- Dekat dengan permukiman atau pusat kegiatan masyarakat;
- Mudah dicapai dengan kemudahan aksesibilitas;
- Dapat diakses dan digunakan untuk publik.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

NT-	Jo Judul Hocil/Variabel		
No	Judul	Hasil/Variabel	
Evaluasi Ketersediaan		Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik RTH yang terdapat di Kota Bekasi dan mengetahui permasalahan	
1.	Ruang Terbuka Hijau di	apa saja yang menghambat terpenuhinya RTH di Kota Bekasi. Masalah yang di dapat yaitu keterbatasan dana, alih fungsi lahan	
	Kota Bekasi (2016)	Kurangnya kesadaran masyarakat, pendanaan, penyediaan lahan,	
		regulasi alih fungsi lahan.	
2.	Impementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Semarang (2016)	Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang dan untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Faktor yang mempengaruhi lambat RTH publik yaitu mahalnya harga lahan, kompetisi sumber daya manusia yang ada di SKPD terkait, komunikasi antar organisasi, dan kesadaran masyarakat.	
3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang terbuka Hijau pada	Dalam penelitian ini melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau. Faktor yang mempengaruhi diantaranya Ketersediaan anggaran, alokasi ruang	

No	Judul	Hasil/Variabel
	setiap dominasi penggunaan	terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang, pelaksanaan program,
	lahan (studi kasus: Kota	partisipasi masyarakat, pengaruh tokoh masyarakat, keberadaan
	Surakarta) (2018)	komunitas hijau, daya serap pohon terhadap CO2, Ketersediaan
		lahan, Nilai Lahan, dan pengawasan pengendalian tata guna lahan
		Analisis penentuan prioritas ruang terbuka hijau, meliputi tumpang
	Metode Penentuan Prioritas	tindih (overlay) semua data vector dan pembobotan dimana daerah
4.	Ruang Terbuka Hijau Di	yang memiliki kerapatan vegetasi jarang, nilai THI tinggi, Jumlah
4.	Kuang Terbuka Tijau Di Kota Banjar Baru (2016)	penduduk padat, harga tanah yang lebih rendah menjadi lokasi
	Kota Banjai Baru (2010)	prioritas pengembangan RTH untuk menambah proporsi ruang
		terbuka hijau wilayah perkotaan
		Menyusun Prioritas Ruang Terbuka Hijau. Parameter kepadatan
		permukiman, kerapatan vegetasi, jarak terhadap jalan utama, jarak
	Penentuan Prioritas Ruang	terhadap penggunaan lahan, dan Temperatur Humidity index (indeks
5.	Terbuka Hijau Di	kenyamanan) tersebut kemudiaan dilakukan suatu overlay untuk
J.	Kecamatan Serengan Kota	mendapatkan tingkat kenyamanan permukiman. Hasil overlay
	Surakarta (2014)	mendapatkan suatu skor total yang dihasilkan dari penjumlahan skor
		pada setiap parameter yang disebut dengan skor total. Skor total
		dapat digunakan untuk mengetahui kelas kenyamanan permukiman.

No	Judul	Hasil/Variabel
		Kelas kenyamanan permukiman didapat dari mengurangi skor total tertinggi dengan skor total terendah dibagi dengan jumlah kelas. Hasil dari kelas kenyamanan permukiman digunakan untuk mengetahui tingkat prioritas ruang terbuka hijau
6.	Analisis Kesesuaian Lokasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kecamatan Palu Timur Dan Palu Barat (2015)	Kriteria penentuan kesesuaian lokasi pengembangan RTH publik di kecamatan Palu timur dan Palu barat dibagi dalam 5 kriteria yaitu kemiringan lereng, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan sarana pendukung.
7.	Identifikasi Lokasi Potensial Untuk Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Aktif di Kota Salatiga (2019)	Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dalam menentukan kesesuaian untuk lokasi RTH Publik yaitu Kelas penggunaan lahan, tingkat kepadatan penduduk, Kelerengan, dan Aksesibilitas. Dan untuk mennetukan prioritas lokasi digunakan variabel status kepemilikan lahan.

Sumber: Sintesis Penulis, 2019

2.4. Sintesis Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah dilakukan, maka didapatkan variabel serta indikator berdasrkan penentuan lokasi dengan mempertimabangkan karakteristisk ruang publik Carr (dalam Utami 2019). Bahwasanya Stephen Carr menyebutkan terdapat 4 karakteristik dari ruang publik yaitu:

• Peruntukan Lahan

Peruntukan lahan merupakan baseline layanan yang di tentukan dari tipe tutupan lahan sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang benar. Dalam peruntukan lahan ditentukan berdasarkan kawasan terbangun dan tak terbangun (P2KH, 2017 & (Utami, 2019))

Sosial

Kepadatan penduduk merupakan komponen dalam menentukan besaran standar dalam perencanaan, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi berkaitan dengan sirkulasi udara yang melewati daerah tersebut maka perlu tambahan udara untuk menambah kenyamanan di daerah tersebut Rottle (dalam Utami, 2019).

Fisik

Dasar dari pertimbangan penggunaan kriteria kemiringan lereng, daerah resapan air dan bukan merupakan daerah rawan banjir yaitu berkaitan dengan faktor keamanana serta kemudahan dalam akses dan realisasi (Grove,1983:119,Chiara,1997,& P2KH,2017)

• Aksesibilitas

Keterkaitan antar jalan akan membentuk suatu integrasi yang berdampak pada tingkat aksesibilitas menuju lokasi yang akan dikunjungi, bahwa jarak terpendek menuju RTH akan mempengaruhi orang untuk datang Rojas, Páez (dalam Utami,2019).

Selain dari keempat karakteristik yang diungkapkan hal yang mempengaruhi dalam penyediaan RTH Publik adalah harga lahan, dimana harga lahan yang rendah dapat dengan mudah di realisasikan untuk di bangun RTH (Nurhanafi, I., Purnaweni, H., & Hidayat, Z., 2016). Untuk lebih detail terkait indikator dan variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Sintesis Pustaka

No	Sumber	Indikator	Variabel
1.	(Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 2017), (Utami,2019)	Peruntukan Lahan	Bukan Merupakan Kawasan Terbangun
2.	(Humaida, 2016), (Prabowoningsih, N. H., Putri, R. A., & Rini, E. F,2018), (Nurhanafi, I., Purnaweni, H., & Hidayat, Z., 2016)	Nilai Lahan	Harga Lahan
3.	(Achsan,2015), (Utami, M. R., & Susanti, R. 2019), (Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 2017), Setiawan, B., & Pigawati, B. (2014)	Aksesibilitas	Jarak Terhadap Jalan Arteri Jarak Terhadap Pusat Kota

No	Sumber	Indikator	Variabel
4.	(Grove,1983:119), (Shirvani, 1983:93) Hasni (dalam Astaman,2018), Zulkifli (dalam Angelia 2017), (Utami, M. R., & Susanti, R. 2019)	Fisik	Kemiringan Lereng Daerah Resapan Air Daerah Rawan Banjir
5.	(Achsan,2015), (Utami, M. R., & Susanti, R. 2019), (Humaida, 2016)	Sosial	Kepadatan Penduduk

Sumber: Analisis Penulis, 2019

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan rasionalistik. Pendekatan rasionalistik adalah Pendekatan ini bersumber dari teori dan fakta-fakta empiris yang juga menekankan pada argumentasi berdasarkan hasil kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti pada suatu topik penelitian pada kajian (Neong.M, 1990). Dalam penelitian rasionalistik seluruh pemikiran didasari ilmu yang dipahami oleh peneliti, serta data yang digunakan untuk analisis adalah data yang dihasilkan dari observasi, kuesioner, wawancara, serta sumber-sumber pendukung lainnya..

Pada intinya penelitian ini dirumuskan terlebih dahulu sebuah konseptualisasi teoritik yang berkaitan dengan pembahasan penetuan prioritas RTH publik. Kemudian pada tahapan akhir dilakukan genaralisasi hasil yaitu menarik sebuah kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis dan landasan teori yang digunakan.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penentuan prioritas lokasi RTH Publik yang sudah ditentukan oleh variabel terkait yang dianalisis dengan Teknik SIG yaitu *overlay* menggunakan *arcgis* 10.2.

Menurut Sugiyono (2012:29) penelitian deskriptif yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Deskripsi ini untuk menjelaskan terkait dengan hasil dari analisis terhadap kriteria kriteria

dari penentuan prioritas lokasi RTH publik dan proses pemilihan lokasi RTH publik.

Penelitian ini memilih pendekatan kuantitatif dikarenakan analisis yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan pengolahan data-data numerik. Faktor-faktor hasil kajian teori akan dibobotkan untuk mengetahui bobot faktor yang menjadi faktor utama dalam pemilihan lokasi prioritas penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi, lalu selanjutnya hasil dari pembobotan tersebut digunakan sebagai input untuk analisa weighted overlay menggunakan aplikasi Arcgis 10.2, setelah dilakukan weighted overlay maka didapatkan lokasi-lokasi prioritas RTH Publik di Kota Bekasi.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan hal yang akan diteliti yang memiliki ukuran, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penentuan variabel penelitian dilakukan berdasarkan hasil dari kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya dilakukan dengan melalui penyesuaian kondisi yang ada pada wilayah penelitian. Berikut merupakan table ringkasan variabel penelitian berserta definisi operasionalnya.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

No	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
1.	Peruntukan Lahan	Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	Lokasi RTH publik berada pada kawasan lahan tak terbangun berdasarkan data eksisting penggunaan lahan Kota Bekasi
2.	Nilai Lahan	Harga Lahan	Merupakan harga lahan terendah pada daerah tersebut
3.	Aksesibilitas	Jarak Terhadap Jalan Arteri	Minimal jarak terhadap jalan arteri ≤ 400 meter
		Jarak Terhadap Pusat Kota	Berada pada jarak 1000m dari pusat kota
4.	Fisik	Kemiringan Lereng	Berada pada kemiringan 0- 25%
		Daerah Resapan Air	Berada pada daerah resapan air

No	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
		Daerah Rawan Banjir	Bukan Merupakan daerah rawan bencana banjir
5.	Sosial	Kepadatan Penduduk	Berada pada Kepadatan penduduk > 5000 jiwa/ Km²

Sumber: Penulis, 2020

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk ditetapkan oleh peneliti yang kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Populasi memiliki kualitas dan karakteristik. Definisi populasi yang dimaksud dari penelitian ini adalah pihak pemerintah dan pihak akademisi.

Untuk memudahkan penelitian maka dilakukan pengambilan sampel terhadap populasi dengan menggunakan teknik nonprobability sampling berdasar purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono, 2016).

Teknik purposive sampling biasanya dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil sampel dalam jumlah besar. Dengan mengambil salah satu bagian yang memiliki peran penting sebagai sampel maka dapat diminimalkan simpangan (ketidakakuratan informasi) yang terjadi.

Dalam menentukan stakeholder untuk kemudian dijadikan sebagai sampel digunakan cara sebagai berikut:

- Identifikasi stakeholder yang terlibat
- Analisa kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder terhadap kebijakan atau program terkait
- Memberikan penilaian dan menentukan tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder
- Menentukan kelompok stakeholder kunci, yang memiliki tingkat kepentingan dari yang tidak berpengaruh sampai sangat berpengaruh

Untuk pengelompokkan stakeholder dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.2 Identifikasi Stakeholders

No	Stakeholders	Peran		
		Sebagai pihak yang berwenang		
1.	Dinas Bina Marga	dalam rencana anggaran dalam		
	dan Sumber Daya Air	menyediakan infrastruktur dan		
		perawatan taman atau RTH.		
		Sebagai pihak yang diberikan		
2.	Dinas Tata Ruang	tanggung jawab dalam		
	Kota Bekasi	merencanakan penyediaan RTH		
		publik		
3.	Sebagai pihak yang yang tu			
	BAPPELITBANGDA	berkoordinasi dalam pengawasan		
	Kota Bekasi	pembangunan infrastruktur sesuai		
		dengan RTRW.		
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	Terlibat dalam pengawasan		
		,perlindungan, serta pemeliharaan		
		lingkungan hidup		
5.	Pihak Kecamatan	Sebagai pihak yang mengerti		
		kondisi eksisting kawasan		
6.		Memiliki pemahaman terhadap		
	Akademisi	faktor-faktor lokasi RTH public		
		dalam segi teoritis		

Sumber: Penulis, 2019

3.5. Metode Penelitian

3.5.1. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik survey sekunder dan primer. Pengumpulan data primer dilakukan

secara observasi di lapangan dan wawancara, sedangkan pada pengumpulan data sekunder bersumber dari dokumen yang dimiliki oleh instansi, seperti Pemerintah Kota Bekasi, Bappeda Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Bekasi, dan instansi lainnya. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.5.1.1. Metode Pengumpulan Data Primer

Survei primer adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung (observasi), wawancara serta kuisioner. Survei primer bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi lingkungan wilayah studi dengan melihat fakta empiris yang ada. Survey primer dalam penelitian ini terdiri atas:

Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi penelitian dengan mengamati permasalahan dan fakta yang terjadi. Dalam observasi ini, dilakukan pula dokumentasi untuk mencitrakan kondisi eksisting wilayah penelitian.

Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan saat analisis AHP dalam menganalisa bobot faktor-faktor untuk penentuan prioritas lokasi penyediaan RTH Publik.

3.5.1.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Survey sekunder dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu data dari sumber-sumber lain. Biasanya berupa dokumen atau data-data yang dibukukan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui:

Survey Instansi Pencarian data dan informasi pada beberapa instansi, yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi serta Dinas Linkungan Hidup Kota Bekasi dan lain-lain.

Survey Literatur, Studi literatur dan kepustakaan dilakukan dengan meninjau isi dari literature yang bersangkutan dengan tema penelitian ini, diantaranya berupa buku, hasil penelitian, dokumen rencana tata ruang, tugas akhir serta artikel di media massa. Studi literature dilakukan dengan merangkum dan mensitasi atau menyimpulkan semua referensi yang berkaitan.

3.5.2. Metode Analisis

3.5.2.1. Analisis Pembobotan dan Penentuan Skala Prioritas faktor penentuan lokasi RTH publik menggunakan Analytics Hierarchy Process (AHP)

Dalam menganalisis skala prioritas kriteria ini menggunakan alat analisis yaitu AHP, yaitu salah satu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang didisain untuk membantu pemecahan terhadap permasalahan yang kompleks dan banyak kriteria pilihan. Penggunaan metode ini hanya pada penentuan faktor prioritas yang digunakan, yaitu dengan teknik perbandingan berpasanagan kemudian diolah sehingga diperoleh bobot masingmasing kriteria. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pembobotan untuk menjawab faktor prioritas dalam menentukan prioritas lokasi penyediaan RTH publik.

Dalam menggunakan analisis ini, diperlukan melakukan wawancara pada orang yang ahli pada bidang yang akan diteliti (Marimin, 2004). Menurut Hardiyanto (2011), permasalahan pengambilan keputusan dapat menjadi kompleks karena adanya pelibatan beberapa tujuan maupun kriteria. Salah satu tool (alat bantu) yang cocok digunakan untuk pemilihan kandidat atau

pengurutan prioritas adalah AHP. Secara spesifik, AHP cocok digunakan untuk permasalahaan pemilihan kandidat ataupun pengurutan prioritas yang memiliki sifatsifat sebagai berikut:

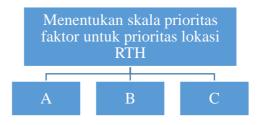
- 1) Melibatkan kriteria-kriteria kualitatif yang sulit dikuantitatifkan secara eksak.
- 2) Masing-masing kriteria dapat memiliki sub-sub kriteria yang dapat dibentuk seperti hirarki.
- 3) Penilaian dapat dilakukan oleh satu atau beberapa pengambil keputusan secara sekaligus.
- 4) Kandidat pilihan sudah tertentu dan terbatas jumlahnya Untuk melakukan analisis AHP, terdapat beberapa tahap. Menurut Marimin (2004), berikut adalah tahapan yang digunakan untuk melakukan AHP:

1) Penyusunan Hierarki

Tahapan pertama yang dilakukkan pada proses AHP. Hal ini dilakukan dengan menentukan permasalahan yang akan diselesaikan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membobotkan faktor atau kriteria dalam menentukan prioritas lokasi penyediaan RTH publik. Dalam proses ini adalah menyusun faktor-faktor berdasarkan hierarkinya.

2) Penyebaran Kuisioner

Tahapan kedua adalah dengan penyebaran kuisioner yang berisi perbandingan antar faktor penentu prioritas lokasi penyediaan RTH publik. Penyebaran kuisioner bertujuan untuk menggali informasi dari seorang ahli pada bidang yang diteliti.



Dalam hal ini berarti ahli pada bidang RTH. Skala pembobotan yang digunakan yaitu berdasarkan skala pembobotan yang telah diolah dari Marimin (2004). Skala pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Skala Preferensi dari Perbandingan Dua Kriteria

Nilai	Keterangan	Penjelasan		
1		Kriteria-kriteria memiliki		
	Kriteria A sama	pengaruh yang sama terhadap		
1	dengan kriteria B	penentuan prioritas penyediaan		
		RTH publik		
	Kriteria A sedikit	Satu kriteria memiliki sedikit		
3	lebih penting dari	pengaruh terhadap penentuan		
	pada kriteria B	prioritas penyediaan RTH publik		
	Kriteria A cukup	Satu kriteria memiliki cukup		
5	penting daripada	pengaruh terhadap penentuan		
	kriteria B	prioritas penyediaan RTH publik		
	Kriteria A sangat	Satu kriteria memiliki pengaruh		
7	penting daripada	yang kuat terhadap penentuan		
	kriteria B	prioritas penyediaan RTH publik		
	Kriteria A mutlak penting daripada kriteria B	Satu kriteria memiliki pengaruh		
9		yang sangat kuat terhadap		
		penentuan prioritas penyediaan		
		RTH publik		

Nilai	Keterangan	Penjelasan
	Apabila ragu antara	
2,4,6,	dua nilai	
dan 8	pertimbangan yang	
	berdekatan	

Sumber: Dalam Marimin (2004)

3) Pengolahan Dengan Matriks Berpasangan

Tahapan ketiga adalah dengan mengolah hasil kuisioner dengan matriks berpasangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai — nilai perbandingan tingkat kepentingan suatu kriteria relatif terhadap faktor lainnya yang berikutnya akan diolah untuk menentukan peringkat atau prioritas relatif dari seluruh krtieria. Matriks perbandingan berpasangan tersebut harus dibuat tiap level yang memiliki hirarki atasan yang sama. Sebagai contoh pada hirarki sebelumnya, kita harus membuat matriks perbandingan berpasangan untuk sub-kriteria kapasitas angkut dan sub-kriteria ketersediaan suku cadang terhadap kriteria spesifikasi, matriks perbandingan berpasangan antara sub-kriteria biaya pembelian, biaya pemeliharaan dan biaya perton mileage terhadap kriteria biaya, dan seterusnya (Hardiyanto, 2014).

Tabel 3.4 Matriks Pairwise Comparison

	W1	W2	••••	Wn
W1	W1-1	W1-2	••••	W1-Wn
W2	W2-1	W2-2		
••••		••••	••••	••••
Wn	Wn-W1	Wn-W2	••••	Wn-Wn

Sumber: Dalam Marimin (2004)

4) Uji Normalisasi

Tahap keempat pada proses AHP yaitu uji normalisasi. Hal ini dilakukan dengan membagi setiap nilai perbandingan berpasangan dengan total nilai perbandingan berpasangan dalam setiap kriteria. Kemudian penjumlahan hasil normalisasi setiap kriteria sehingga diperoleh jumlah bobot tiap kriteria pembanding yang sama. Ilanjutkan dengan pembagian jumlah bobot tiap kriteria dengan banyaknya kriteria (pembanding). Langkah yang terakhir adalah dengan melakukan konfirmasi nilai bobot yang diperoleh dengan menjumlahkan hasil yang diperoleh harus sama atau mendekati $1 (\sum Wi = 1)$. Proses ini dapat otomatis dilakukan software analisis yaitu software Expert Choice 11

5) Uji Konsistensi

Tahap kelima dilakukan dengan uji konsistensi nilai matriks perbandingan berpasangan. Hal ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dengan mengalikan bobot yang diperoleh dengan nilai — nilai perbandingan berpasangan, kemudian menjumlahkan hasil kali pada langkah pertama di atas pada setiap elemen pembanding, kemdian membagi jumlah bobot dengan bobot (Wi) sehingga diperoleh nilai eigenvector, kemudian menghitung eigenvalue (maksimal 1) dengan membagi eigenvector dengan konsistensi (CI) dan menghitung rasio konsistensi (CR). Matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio konsistensinya tidak lebih atau sama dengan 0,1.

6) Hasil Evaluasi

Tahap keenam adalah dengan menggabungkan pendapat responden. Analisis AHP digunakan untuk mengolah data lebih dari satu responden. Dalam aplikasi penliaian kriteria dan alternatif dilakukan oleh beberapa ahli.

Konsekuensinya pendapat dari beberapa ahli tersebut perlu dikonfirmasi satu – persatu. Pendapat yang konsisten digabung dengan menggunakan rata – rata geometrik untuk memeroleh prioritas gabungan. Dan hasil penggabungan ini nantinya akan dihitung dengan tahapan AHP. Untuk menghitung rata – rata geometri. Maka dari itu, sasaran ketiga dalam penelitian ini akan tercapai, dimana sudah ditentukannya bobot dari faktor penentu prioritas lokasi untuk peyediaan RTH publik di Kota Bekasi. Masingmasing kriteria yang sudah berbobot tersebut kemudian akan dilanjutkan ke analisis berikutnya.

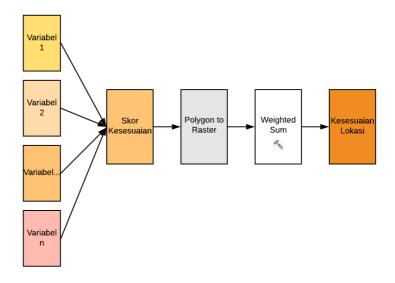
Output-an yang diharapkan pada analisis AHP ini berupa skala prioritas pada masing-masing faktor atau kriteria yang ada.

3.5.2.2. Analisis Penentuan kesesuaian Lokasi Penyediaan RTH publik dan Lokasi Prioritas Menggunakan Sistem Indormasi Geografis (SIG)

Pada tahap ini, digunakan analisis overlay untuk mencari kesesuaian lokasi dan lokasi prioritas yang sesuai untuk penyediaan RTH publik. Dalam menentukan prioritas analisis yang digunakan adalah bobot dari analisis AHP dan nilai pada masingmasing kesesuaian lahan berdasarkan paramater faktor atau kriteria yang sudah di tentukan. Kriteria dan bobot akan digunakan untuk penentuan prioritas lokasi dengan cara digambarkan kepada petapeta yang sesuai. Sedangkan dalam menentukan kesesuaian lokasi dilakukan dengan membagi 2 kelas yaitu, sesuai atau tidak sesuai, dilakukan berdasarkan parameter yang sudah ada.

Analisis overlay yang digunakan dalam menentukan kesesuaian lokasi adalah weighted sum yang merupakan salah satu alat analisis pada ArcGIS yang mengombinasikan peta grid dengan

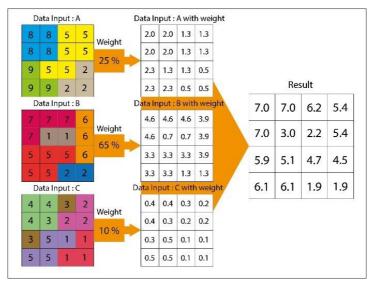
penilaian dari masing-masing variabel yang sudah di justifikasi sebelumnya, dan pada tahap ini bobot diberikan dengan nilai 1 pada setiap variabelnya. Hasil dari weighted sum menunjukkan pengaruh tiap input tersebut pada suatu wilayah geografis. Dimana dalam proses ini terlebih dahulu dibagi menjadi 2 kelas, yaitu tidak sesuai (0) dan sesuai (1), kelas ditentukan berdasarkan justifikasi dari parameter yang sudah dibuat. Setelah dilakukan analisis ini, tujuan dari penelitian ini akan tercapai, yaitu telah ditentukannya kesesuaian lokasi dari tiap masing-masing variabel untuk RTH publik di Kota Bekasi berdasarkan klasifikasi kelas yang sudah dilakukan. Pada tahapan pertama analisis kesesuaian lokasi yang dilakukan adalah merubah peta polygon yang sudah diberi nilai kesesuaian berdasarkan parameter yang sudah ada dari setiap peta tematik kemudian dirubah ke dalam bentuk peta raster. Kemudian bobot nilai yang diberikan pada kesesuaian ini adalah 1 dari setiap variabel sehingga akan menghasilkan peta kesesuaian dengan jumlah maksimal variabel yang dianalisis.



Gambar 3.1 Analisis Kesesuaian Lokasi RTH Publik Kota Bekasi

Sumber: Identifikasi Penulis,2020

Setelah mendapat peta kesesuain, kemudian dilakukan pembobotan pada kesesuaian masing-masing peta tematik berdasarkan variabel yang sudah justifikasi, bobot diambil dari hasil pembobotan AHP. Pada analisis ini ditentukan interval kelas hasil dari penjumlahan antara pembobotan AHP yang dikalikan dengan nilai kesesuaian dari setiap peta tematik. Interval tersebut menggunakan weighted-sum Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.2 Cara Kerja Weighted Sum

Sumber: Srisawat, P., Kronprasert, N., & Arunotayanun, K. (2017)

Setelah mendapatkan interval kelas, hal selanjutnya Selanjutnya dilakukan proses intersect antara peta kesesuaian lokasi RTH publik dengan peta nilai interval lokasi RTH publik. Kemudian setelah didapatkan range nilai pada peta kesesuaian lokasi langkah selanjutnya yaitu melakukan perangkingan. Rumusan perangkingan dilakukan berdasarkan rumus pada gambar dibawah ini:

Range kelas =
$$\frac{range (nilai tertinggi-nilai terendah)}{fumlah kelas}$$

Gambar 3.3 Rumusan Penentuan Range Kelas

Sumber: Wicaksono, R. A., & Zuharnen, Z. (2017)

Dari pembagian range kelas tersebut kemudian akan dibagi menjadi 3 ranking yaitu, Sangat Prioritas (1), Prioritas (2), dan Bukan Prioritas (3). Setalah dilakukan pengkelasan kelas prioritas, hal selanjutnya dilakukan intersect antara hasil dari kesesuaian lokasi (hanya yang sesuai) dengan peta interval kelas yang sudah didapatkan sebelumnya, sehingga didapatkan peta prioritas lokasi RTH publik tersebut.

3.6. Tahapan Penelitian

Penelitian ini akan merumuskan prioritas lokasi untuk penyediaan RTH publik di Kota Bekasi. Untuk mencapai hal tersebut, maka tahapan penelitian yang akan dilakukan ada lah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah

Pada tahapan ini terdiri atas identifikasi masalah, yakni masih kurang RTH Publik dari jumlah minimal kebutuhan yaitu hanya sebesar 3,75% dari 20% untuk penyediaan RTH publik.

2. Studi Pustaka

Merupakan tahap tinjauan dari berbagai literatur terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian mengenai analisis penentuan prioritas lokasi penyediaan RTH publik. Mulai dari definisi, RTH Publik, teori maupun tinjauan penyediaan RTH Publik, hingga fakto-faktor apa saja yang digunakan dalam menentukan prioritas RTH. Sumber pustaka berasal dari Buku, Jurnal, Tugas Akhir, Undang-Undang, serta Internet.

3. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data dilakukan melalui survey sekunder dan surver primer. Kelengkapan dan keakuratan data sangat mempengaruhi oleh proses analisis dan hasil penelitian. Sehingga pengumpulan data yang dilakukan harus memiliki validitas yang tinggi.

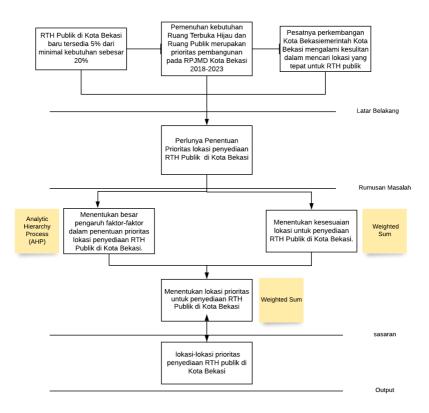
4. Analisis Data

Setelah data terhimpun, akan dilakukan tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap pembahasan dari seluruh sasaran yang telah dirumuskan dalam penelitan. Hasil analisis nantinya adalah sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian. Dalam tahap analisis ini terdapat beberapa bagian, yaitu (1) Analisa Faktor prioritas Penentuan Lokasi RTH Publik dengan menggunakan metode AHP. Tujuan dari analisis ini untuk mendapatkan bobot dan juga prioritas dari masing-masing variabel untuk input dalam analisis selanjutnya, kemudian dilakukan (2) Analisis penentuan kesesuaian lokasi RTH Publik dengan menggunakan metode weighted-sum. Analisis lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan kesesuaian lokasi untuk RTH Publik di Kota Bekasi. Kemudian dilanjutkan (3) Analisis penentuan prioritas lokasi RTH Publik dengan menggunakan weighted-sum berdasarkan kesesuian dan bobot yang sudah ditentukan pada analisis sebelumnya. Sehingga pada analisis tahap terakhir ini didapatkan prioritas lokasi penyediaan RTH publik di Kota Bekasi.

5. Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap terakhir sekaligus merupakan jawaban dari penilitian. Penarikan kesimpulan berdasarkan atas hasil analisa data. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait daerah prioritas yang diperuntukan untuk penyediaan RTH publik di wilayah studi yaitu Kota Bekasi.

3.7. Kerangka Berfikir



Gambar 3.4 Kerangka Penelitian

Sumber: Penulis, 2019

"Halaman ini Sengaja dikosongkan"

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah

Wilayah penelitian berada di Kota Bekasi dengan. Dimana Kota Bekasi terdiri dari 12 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bantar Gerbang, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Medan Satria, dan Kecamatan Rawalumbu. Luas wilayah Kota Bekasi sebesar 21.283 Ha. Adapun batas administrasi Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

• Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi

• Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
 Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

Sedangkan secara astronomis, wilayah Kota Bekasi terletak pada 106048'28'' – 107027'29'' Bujur Timur dan 6010'6'' – 6030'6'' Lintang Selatan.Adapun untuk luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada table dibawah ini:

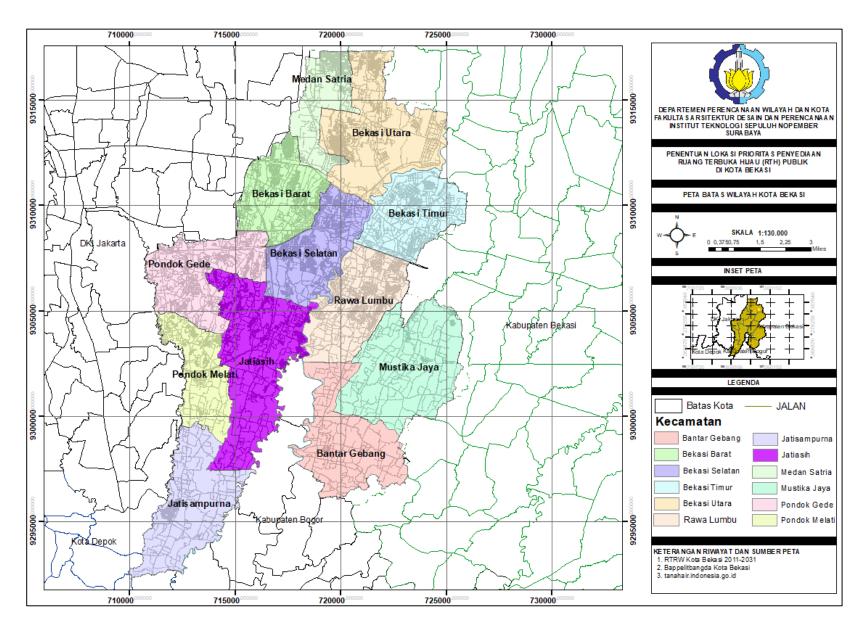
Tabel 4.1 Luas Kecamatan Wilayah Studi

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Bekasi Timur	1463,82207	6,87
2.	Bantar Gebang	1884,30017	8,84
3.	Bekasi Barat	1442,05999	6,77
4.	Rawa Lumbu	1711,76448	8,03
5.	Mustika Jaya	2497,13623	11,7
6.	Bekasi Utara	2436,91163	11,4
7.	Bekasi Selatan	1538,09374	7,22

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase (%)
8.	Jatiasih	2575,02989	12,1
9.	Pondok Gede	1654,54218	7,76
10.	Jatisampurna	1921,15948	9,01
11.	Pondok Melati	1175,29428	5,51
12.	Medan Satria	1011,62674	4,75

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2020

Berikut peta pembagian wilayah dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada halaman berikutnya:



Peta 4.1 Batas Administratif Kota Bekasi

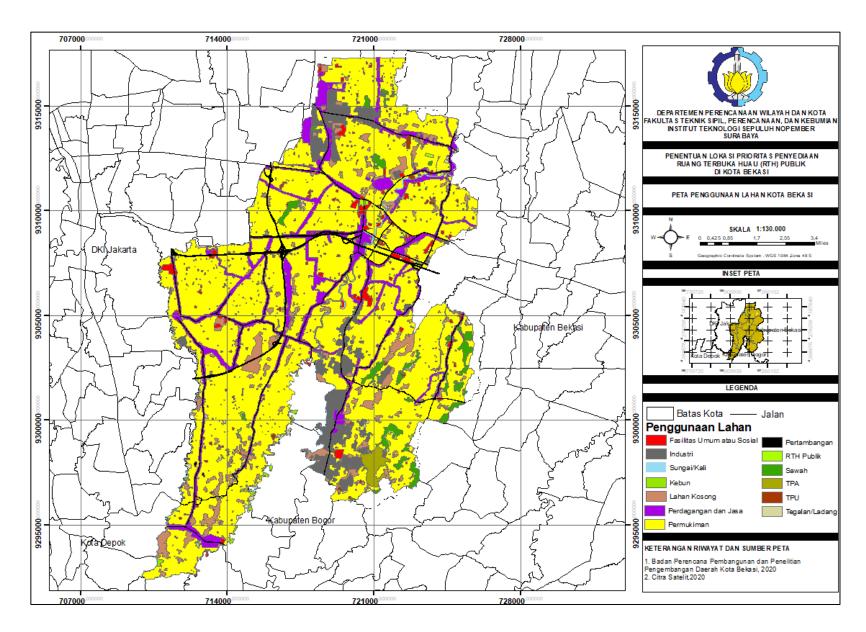
Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi,2020

4.1.1. Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kota Bekasi tahun 2011-2031, penggunaan lahan di Kota Bekasi di dominasi oleh lahan permukiman, dimana presentase menunjukan hingga 70% dari luas wilayah. Berikut penggunaan lahan di Kota Bekasi ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Penggunaan Lahan Di Kota Bekasi

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)	
Kawas	an Terbangun			
1	Permukiman	14994,599969	70,4	
2	Perdagangan dan Jasa	2260,734861	10,6	
3	Industri	1163,536806	5,46	
4	Fasilitas Umum atau Sosial	513,426954	2,41	
5	Pertambangan	3,992303	0,02	
5	Ruang Terbuka Hijau	29,409042	0,14	
6	TPA	142,170813	0,67	
Kawas	Kawasan Tak Terbangun			
7	TPU	70,196593	0,33	
8	Sawah	420,62545	1,98	
	Lahan Kosong	1326,613238	6,23	
9	Kebun	93,334447	0,44	
10	Tegalan/Ladang	100,87421	0,47	
11	Sungai/Kali	177,04129248835	0,83	



Peta 4.2 Penggunaan Lahan Kota Bekasi

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi dan Citra Satelit,2020

4.1.2. Pusat Kota

Berdasarkan RTRW Kota Bekasi tahun 2011-2031, Kota Bekasi dibagi menjadi 5 batas wilayah pengembangan (BWP) yaitu:

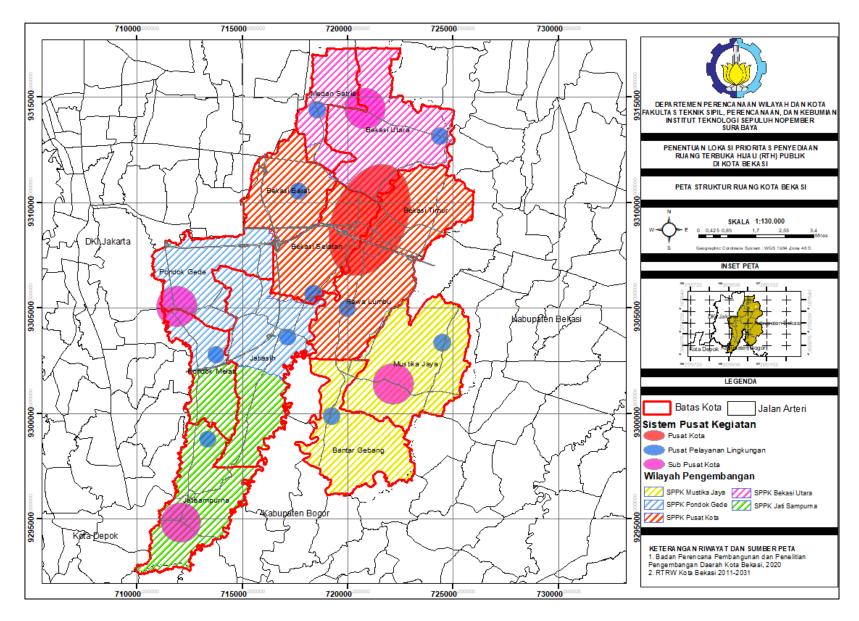
- BWP Bekasi Utara, wilayah administrasi yang tergabung kedalam BWP Bekasi utara adalah Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria
- BWP Pusat Kota, wilayah administrasi yang tergabung dalam BWP Pusat Kota adalah Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Rawalumbu
- BWP Pondok Gede, wilayah administrasi yang tergabung dalam BWP Pondok Gede adalah Kecamatan Pondok Gede, dan sebagian wilayah Kecamatan Jatiasih dan Pondok melati.
- BWP Jati Sampurna, wilayah administrasi yang tergabung dalam BWP Jati Sampurna adalah Kecamatan Jatisampurna dan sebagian wilayah Kecamatan Pondok Melati dan Jatiasih
- BWP Mustika Jaya, wilayah administrasi yang tergabung dalam BWP Mustika Jaya adalah Kecamatan Bantar Gebang dan Kecamatan Mustika Jaya.

Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan peta 4.3.

Tabel 4.3 Luas Masing-Masing BWP pada Struktur Ruang Kota Bekasi

No.	Wilayah Pengembangan	Luas (Ha)	
	Batas Wilayah Pengembangan		
1.	Pusat Kota	6242,092614	
2.	Mustika Jaya	4396,302591	
3.	Bekasi Utara	3390,875364	
4.	Jati Sampurna	3537,283632	
5.	Pondok Gede	3717,442327	

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi,2020



Peta 4.3 Struktur Ruang Kota Bekasi

Sumber: RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031

4.1.3. Aksesibilitas

Pada wilayah studi jaringan jalan yang terbagi menjadi beberapa fungsi jalan yaitu, jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Adapun Jaringan jalan di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

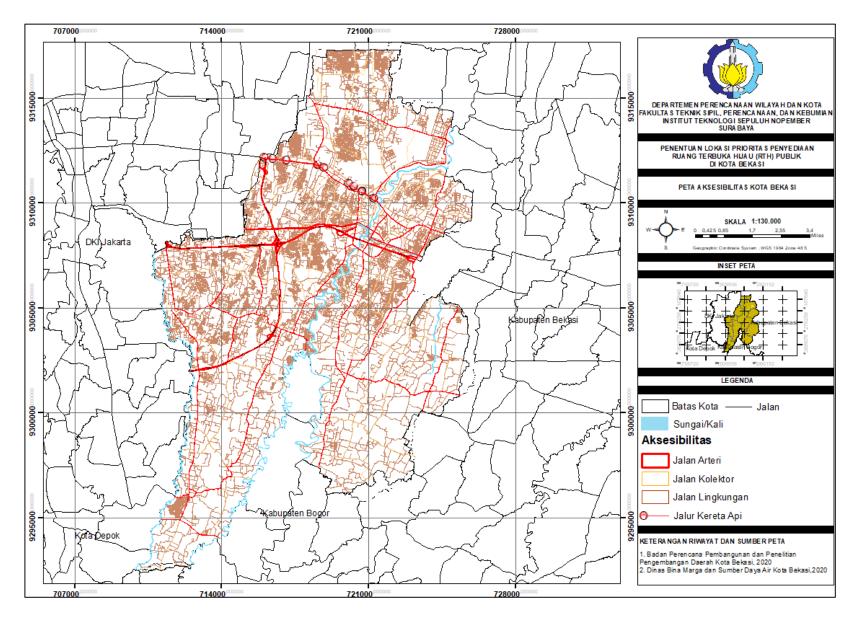
Tabel 4.4 Jaringan Jalan di Kota Bekasi

	Tabel 4.4 Jai ingan Jaian ui Kota Bekasi			
No	Jaringan Jalan	Persebaran		
1)	Arteri Primer	Jl. Tol Lingkar Luar Jakarta, Jl. Tol Lingkar Luar Timur, Jl. Tol Jakarta – Cikampek, Jl. Tol Lingkar Luar Tenggara, Jl. H. Djole, Jl. HM. Joyo Martono, Jl. Jatiwaringin, Jl. Jatimekar, Jl. Pejuang, Jl. Lingkar Utara, Jl. Sultan Agung, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Cut Mutia, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jl. Siliwangi, Jl. Trace Yogie, Jl. Raya Chairil Anwar, Jl. I. Gusti Ngurah Rai, Jl. Pejuang - Jl. Kaliabang, Jl. Siliwangi (Narogong) Jalan Raya Jati Asih, Jalan Raya Wibawa Mukti, Jalan Raya Alternatif Cibubur, Jl. Noer Ali, Jl. Cut Mutia, Jl. Ir H Juanda, Jl. Jendral Sudirman, Jl. Sultan Agung, Jl. Jendral Sudirman,		

No	Jaringan Jalan	Persebaran	
		JI. Mayor Hasibuan,	
		Jalan Raya Kranggan,	
		Jalan Hankam Raya,	
		JI. M Joyomartono	
		Jalan Cakung Payangan - Pasar Kranggan,	
		Jalan Jati Rahayu,	
		Jalan Dr. Ratna,	
		Jalan Raya Pekayon,	
		JI. Perjuangan,	
		Jalan Raya Mustika Jaya,	
	Arteri	JI. Pekayon Jaya-Pekayon Raya,	
2)	Arteri Sekunder	JI. Pahlawan,	
	Sekulidel	JI. R.A. Kartini,	
		Jalan Swatantra,	
		Jalan Raya Kodau,	
		Jalan Raya Wibawa Mukti,	
		JI. Kampung Irian (Ujung Harapan),	
		Jalan Cakung Payangan - Pasar Kranggan,	
		Jalan Kranggan Permai,	
		Jalan Kali Manggis, Jalan Jati Rangga,	
		Jalan Palem Raya, Jalan Raya Legok,	
		Jalan Pasar Kecapi, Jalan Gamprit, Jalan	
	Kolektor	Setia-Kemang Sari, Jalan Suluki Cempaka,	
3)	Primer	Jalan Kincan - Jatibening 2, Jalan Kp. Jati -	
	Timer	Asem - Kelapa Dua, Jalan Cimuning, Jalan	
		Mandor Demang,	
		JI. Kaliabang Tengah-K.H. Mahedir,	
		JI. Pemuda (Patriot),	

No	Jaringan Jalan	Persebaran
		JI. Bintara Raya, JI. Sersan Aswan, JI. H
		Agus Salim, JI. Cipendawa, JI. Serma
		Marjuki, JI. Wahab Affan
		JI. Veteran, Sisi Selatan Jl. Pangeran
		Jayakarta, Jl. Galaxy, Jl. Perumahan
		Permata – Cikunir, Jl. Penghubung Jl.
		Boulevard - Jl. Asamawi
		KH. Agus Salim-Jalan Perjuangan,
		Simpang Jalan Caringin Dua-Simpang Jalan
		Mustika Sari,
	Kolektor	Simpang Jalan RA. Kartini-Simpang Jaln Ir.
4)	Sekunder	H. Juanda,
	Sekulidel	Jalan Gunung Salak-Jalan Letnan Arsyat,
		Jalan Komodo simpang
		Jalan Nangka - Jalan Cendrawasih
		Jalan Siliwangi - TPA Bantar Gebang
5)	Lingkungen	Di seluruh bagian lingkungan perumahan
5)	Lingkungan	Kota Bekasi

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2020



Peta 4.4 Aksesibilitas Kota Bekasi

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2020

4.1.4. Kependudukan

Berdasarkan definisi BPS (2018), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk dalam suatu daerah merupakan subyek dan obyek pembangunan.

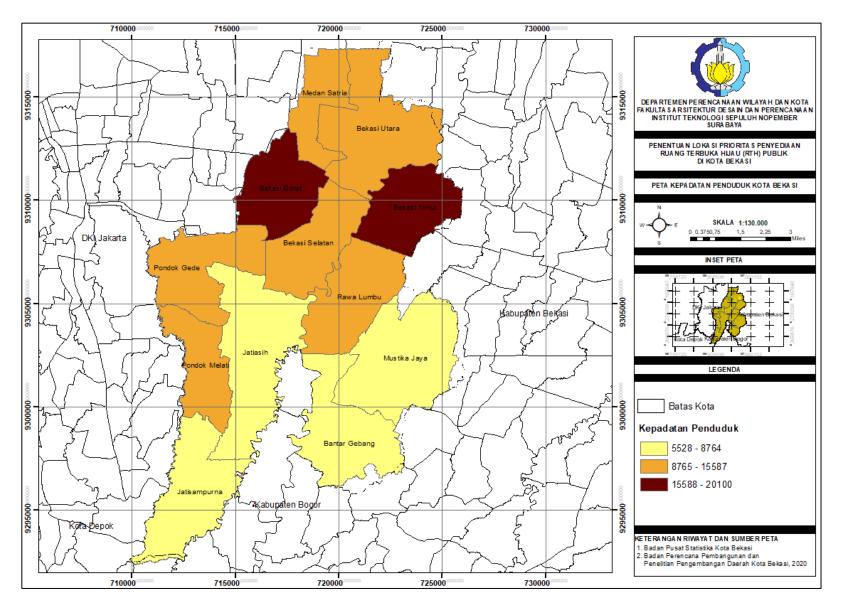
Distribusi penduduk Kota Bekasi, seperti tersaji pada table berikut ini. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 329.950 jiwa dan yang paling sedikit terdapat di kecamatan Bantar Gebang yaitu sebanyak 105.370 jiwa. Total kepadatan penduduk rata-rata mencapai 690,14 jiwa/ Km², dimana kepadatan tertinggi pada Kecamatan Bekasi Barat sebesar 20.117 jiwa/ Km², dan yang terendah adalah Kecamatan Bantar Gebang yaitu 5597 jiwa/ Km².

Tabel 4.5 Distribusi Penduduk menurut Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/ Km²))
1.	Bekasi Timur	14,62	271420	18569
2.	Bantar Gebang	18,83	105370	5596,7
3.	Bekasi Barat	14,41	289850	20117
4.	Rawa Lumbu	17,11	220590	12892
5.	Mustika Jaya	24,95	195130	7820,3
6.	Bekasi Utara	24,34	329950	13555
7.	Bekasi Selatan	15,38	211440	13747
8.	Jatiasih	25,7	225680	8782
9.	Pondok Gede	16,51	228330	13827
10.	Jatisampurna	19,14	106200	5548,3

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/ Km²))
11.	Pondok Melati	11,74	127200	10832
12.	Medan Satria	10,11	157680	15603

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2020



Peta 4.5 Kepadatan Penduduk Kota Bekasi

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Bekasi,2020

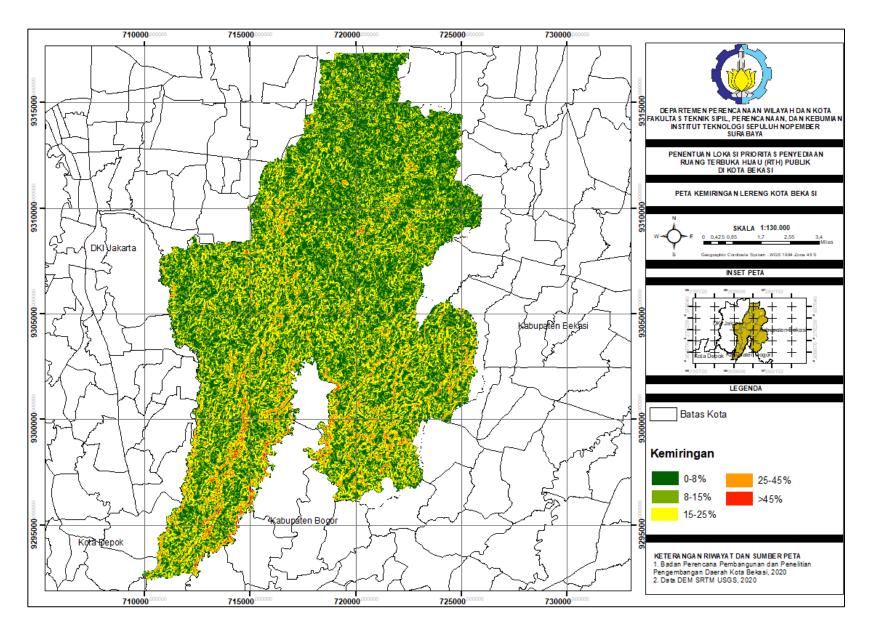
4.1.5. Kemiringan Lereng

Kondisi kemiringan lereng Kota Bekasi relatif datar dan landai, dimana kemiringan paling dominan antara 0–8 dan 8- 15 persen. Untuk luas masing-masing kelas kemiringan lereng pada wilayah studi dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini:

Tabel 4.6 Kemiringan Lahan di Kota Bekasi

No	Kemiringan	Luas (Ha)
1	0-8%	7626,815851
2	8-15%	7933,781391
3	15-25%	4557,987141
4	25-45%	1169,888948
5	>45%	72,451177
5	0-8%	7626,815851

Sumber: Data DEM SRTM USGS,2020



Peta 4.6 Kemiringan Lereng Kota Bekasi

Sumber: Data DEM SRTM USGS, 2020

4.1.6. Hidrogeologi

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bekasi nomor 14 tahun 2014 tentang penelolaan air tanah, data hidrogeologi dibagi menjadi dua, yaitu daerah luapan atau lepasan air tanah dan daerah imbuhan air tanah.

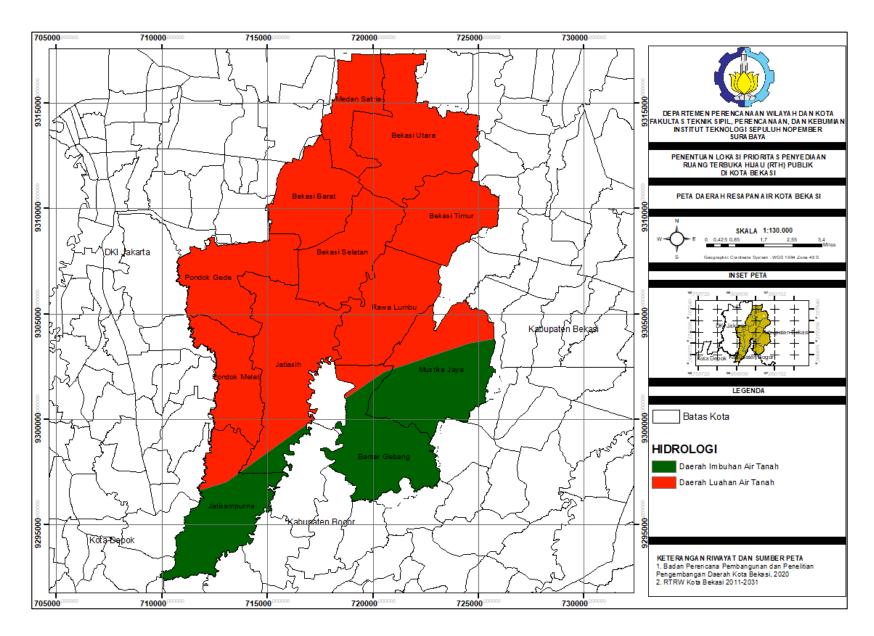
Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. Luasan daerah imbuhan air pada Kota Bekasi adalah 5041.867 Ha.

Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah. Luasan daerah lepasan atau luahan air pada Kota Bekasi adalah 16241,971 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar peta dibawah ini:

Tabel 4.7 Data Hidrologi Kota Bekasi

No	Daerah Hidrologi	Luas
1	Daerah Imbuhan Air Tanah	5041,86648039967 Ha
2	Daerah Lepasan atau Luahan Air Tanh	16241,9711115198 Ha

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi,2020



Peta 4.7 Hidorologi Kota Bekasi

Sumber: BAPELITBANGDA Kota Bekasi,2020

4.1.7. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Pada wilayah studi terdapat daerah rawan bencana banjir untuk lebih jelasnya dapat dilihat data berikut:

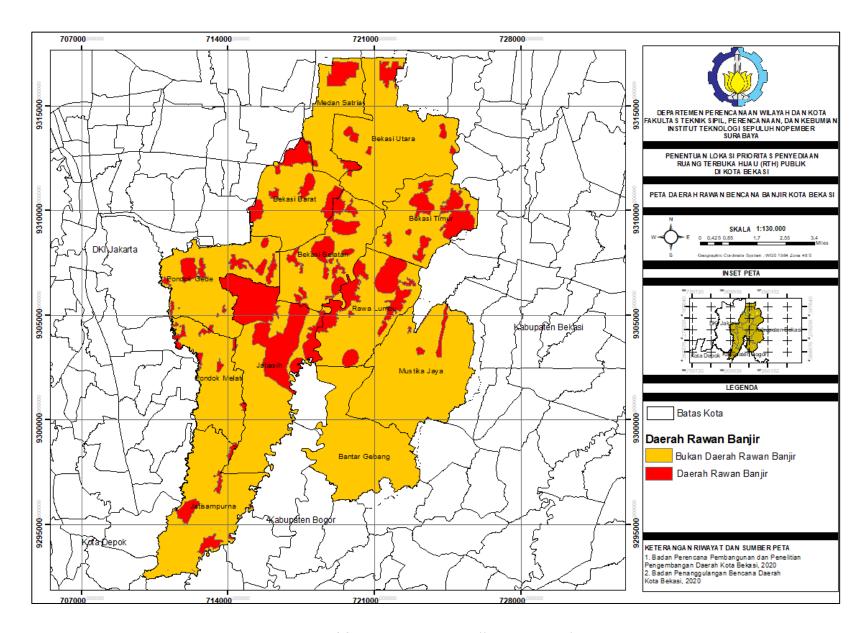
Daerah Rawan Bencana Bajir

Kota Bekasi merupakan wilayah yang dilalui oleh 12 aliran sungai, sehingga Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap luapan air sungai pada musim penghujan, serta pengaruh terhadap beberapa kemiringan dan topologi dari beberapa wilayah. Beberapa titik banjir dan genangan yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman bencana banjir di Kota Bekasi, antara lain dapat dilihat pada tabel dan peta berikut:

Tabel 4.8 Luas Daerah Rawan Bencana Banjir Di Kota Bekasi

No	Kerawanan Bencana Banjir	Luas (Ha)
1	Daerah rawan bencana banjir	3614,959359
2	Bukan merupakan daerah rawan bencana banjir	17668,878233

Sumber:BPBD Kota Bekasi dan Bappelitbangda Kota Bekasi,2020

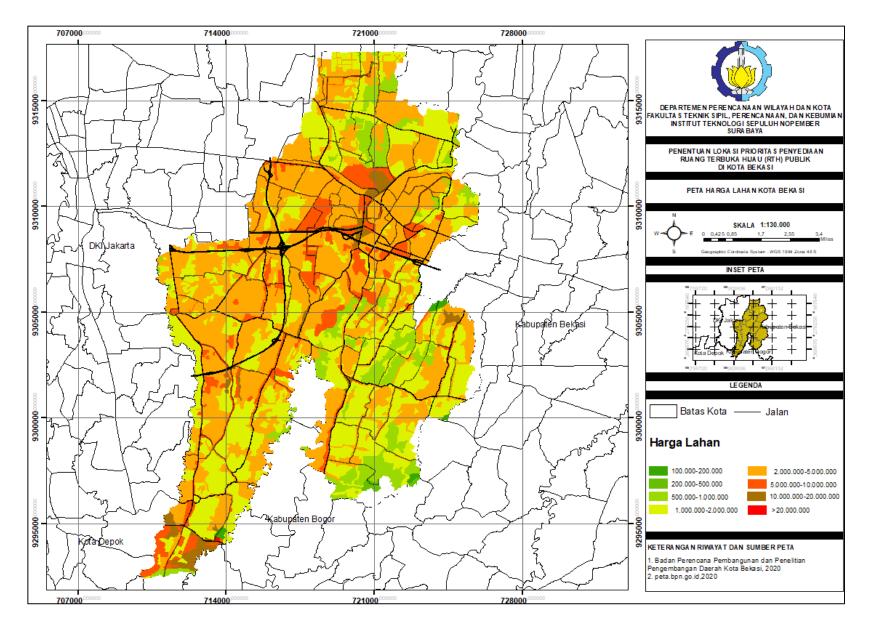


Peta 4.8 Daerah Rawan Banjir Kota Bekasi

Sumber: BAPPELITBANGDA dan BPBD Kota Bekasi, 2020

4.1.8. Harga Lahan

Harga Lahan pada Kota Bekasi sangat beragam. Dimana harga lahan atau nilai tanah yang didapat berdasarkan data peta.bpn.go.id memiliki harga terendah dengan harga Rp100.000-200.000 hingga harga tertinggi mencapai >Rp20.000.000, penetapan nilai tanah dapat berkembang sesuai dengan letak strategis dan penetapannya pada penggunaan lahan di Kota Bekasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta 4.9:



Peta 4.9 Harga Lahan Kota Bekasi

Sumber: peta.bpn.go.id

4.1.9. Ruang Terbuka Hijau Publik Eksisting

Berdasarkan data eksisting, RTH yang berada pada wilayah studi di golongkan menjadi Taman Kota, Taman lingkungan, Taman rekreasi, Taman RW, Hutan Kota, Jalur Hijau, Pulau Jalan dan Tempat Pemakaman Umum. Pada kondisi eksisting luas RTH publik memiliki presentase sebesar 3,57% dan peningkatan luas tidak terlihat signifikan dimana pada tahun 2016-2018 hanya meningkat sebesar 0,9%, yang sebelumnya memiliki presentase sebesar 3,48%. Untuk lebih jelasnya dapa dilihat pada tabel dibawah ini dan peta persebaran lokasi dan beberapa dokumentasi RTH publik yang ada di Kota Bekasi.

Tabel 4.9 Data RTH Kota Bekasi

Tahun	RTH Private	%	RTH Publik	%	Total Luas RTH	%
2016	1589	7.55	732,09	3.48	2321,97	11,03
2017	1624,92	7.72	752,31	3.57	2377	11,29
2018	1624,92	7.72	752,31	3.57	2377	11,29

Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Bekasi,2020

Berikut beberapa dokumentasi terkait RTH publik yang ada di Kota Bekasi, dokumentasi diambil dengan cara survey sekunder dan survey primer, survey sekunder diambil dari *gmaps dan google image* tahun 2020.

Tabel 4.10 Beberapa Dokumentasi RTH Publik di Kota Bekasi

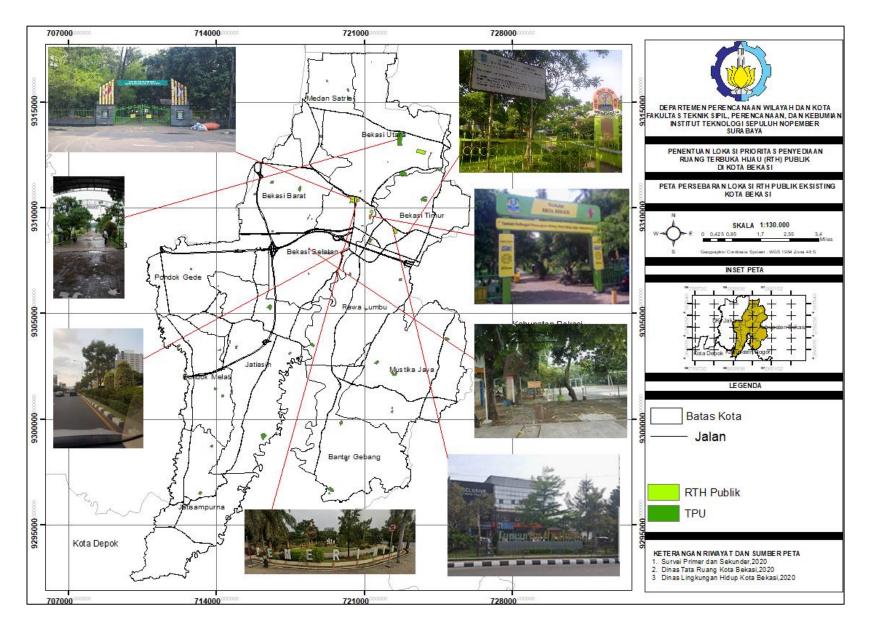
Dokumentasi	Nama
	Taman Cut Mutiah
"Taman Sebagai Paru-paru Kota, Mari kia Jinga kalamanan Kota Bara Bara Bara Bara Bara Bara Bara Ba	Taman Kota Bekasi
	Hutan Kota Bekasi

Dokumentasi	Nama
	Taman lalu lintas Kota Bekasi
Taracu S.J. In Suffer	Taman Bulan-Bulan
	Taman Hijau Pekayon

Dokumentasi	Nama
ENERILL	Taman Pemerintah Kota Bekasi
	Median Jalan A. Yani

Dokumentasi	Nama
PB PA SEAT	TPU Padurenan Kota Bekasi

Sumber: Survey sekunder dan survey primer, 2020



Peta 4.10 Persebaran Lokasi RTH eksisting di Kota Bekasi

Sumber: DISTARU,DLH dan DBMSDA Kota Bekasi, 2020

4.2. Analisis Pembobotan dan Penentuan Skala Prioritas Faktor Penentuan Lokasi RTH Publik

Dalam analisis pembobotan dan penentuan skala prioritas faktor-faktor penentuan lokasi RTH Publik unit analisis yang digunakan adalah *Analytics Hierarchy Process* (AHP), sebelum melakukan analisis tersebut terlebih dahulu menyusun hierarki, penyusunan hierarki digunakan dalam penentuan pembobotan berdasarkan tingkatannya. Dimana seluruh variabel akan dibandingkan. Berikut hierarkinya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1 Struktur Hierarki Faktor Penentuan Prioritas Lokasi RTH Publik di Kota Bekasi

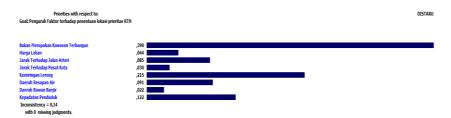
Sumber: Peneliti, 2020

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara kuisioner dengan stakeholder kunci, didapatkan data yang kemudian dikompilasi dalam aplikasi *expert choice 11*. Hasil wawancara dengan stakeholders dapat dilihat pada lampiran IV, untuk data hasil perbandingan dari setiap stakeholder dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.2 Pembobotan Stakeholder Bappelitbangda Kota Bekasi

Berdasarkan hasil pembobotan pada stakeholder Bapelitbangda Kota Bekasi faktor tertinggi yang didapatkan adalah variabel daerah resapan air dengan bobot sebesar 34,2% dan bobot terendah pada variabel jarak terhadap pusat kota yaitu sebesar 1,6%.



Gambar 4.3 Hasil Pembobotan Stakeholder Distaru Kota Bekasi

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil pembobotan pada stakeholder Distaru Kota Bekasi faktor tertinggi yang didapatkan adalah variabel bukan kawasan terbangun dengan bobot sebesar 39% dan bobot terendah pada variabel bukan daerah rawan banjir yaitu sebesar 2,2%.



Gambar 4.4 Hasil Pembobotan Stakeholder DLH Kota Bekasi

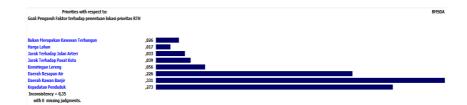
Berdasarkan hasil pembobotan pada stakeholder DLH Kota Bekasi faktor tertinggi yang didapatkan adalah variabel bukan merupakan kawasan terbangun dengan bobot sebesar 35,1% dan bobot terendah pada variabel jarak terhadap pusat kota yaitu sebesar 2%.



Gambar 4.5 Hasil Pembobotan Stakeholder Akademisi (ITB)

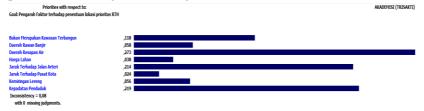
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil pembobotan pada stakeholder Akademisi (ITB) faktor tertinggi yang didapatkan adalah variabel kepadatan penduduk dengan bobot sebesar 25,6% dan bobot terendah pada variabel jarak terhadap pusat kota yaitu sebesar 2,5%.



Gambar 4.6 Hasil Pembobotan Stakeholder DBMSDA Kota Bekasi

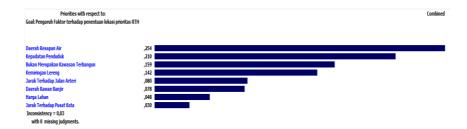
Berdasarkan hasil pembobotan pada stakeholder DBMSDA Kota Bekasi faktor tertinggi yang didapatkan adalah variabel bukan daerah rawan banjir dengan bobot sebesar 33,1% dan bobot terendah pada variabel harga lahan dengan bobot sebesar 1,7%.



Gambar 4.7 Hasil Pembobotan Stakeholder Akademisi (Trisakti)
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berikut merupakan hasil pembobotan pada stakeholder Akademisi (Trisakti) faktor tertinggi yang didapatkan adalah variabel daerah resapan air dengan bobot sebesar 27,3% dan bobot terendah pada variabel jarak terhadap pusat kota dengan bobot sebesar 2,4%.

Setelah didapatkan pembobotan dari setiap stakeholder, selanjutnya dilakukan kombinasi pembobotan dari seluruh stakeholder , berikut hasil output dari pengolahan kombinasi data pembobotan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.7 Output Hasil Kombinasi Pembobotan Faktor penentu Lokasi Prioritas RTH Publik di Kota Bekasi

Gambar diatas merupakan hasil matriks dari kombinasi penilaian dari seluruh stakeholder. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa analisis yang didapat menunjukan nilai *inconsistency* sebesar 0,03 yang dimana artinya jika nilai *inconsistency* dibawah 10% atau 0,1 maka matriks perbandingan dapat diterima. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa dalam variabel yang mempengaruhi penentuan prioritas lokasi RTH publik adalah daerah resapan air dengan nilai sebesar 25,4%, diurutan kedua kepadatan penduduk dengan nilai sebesar 21%, urutan ketiga bukan merupakan kawasan terbangun dengan nilai sebesar 15,9%, urutan keempat kemiringan lereng dengan nilai sebesar 14,2 %, urutan kelima jarak terhadap jalan arteri dengan nilai sebesar 8%, urutan keenam daerah rawan banjir dengan nilai sebesar 7,8%, urutan ketujuh harga lahan 4,8%, dan diurutan terakhir jarak terhadap pusat kota dengan nilai sebesar 3%.

4.3. Analisis Penentuan Kesesuaian dan Prioritas Lokasi RTH Publik

4.3.1. Analisis Penentuan Kesesuaian Lokasi RTH Publik di Kota Bekasi

Dalam proses analisis kesesuaian data spasial dilakukan secara langsung di dalam software ArcGis dengan menggunakan metode weighted sum.

Tahapan analisis pertama dilakukan dengan merubah data polygon menjadi data raster, kemudian melakukan *skoring* peta-peta tematik yang didalamnya terdapat atribut peta yang diklasifikasikan menjadi (1) sesuai dan (0) kurang sesuai. Pemberian *skoring* berdasarkan pada studi-studi sebelumnya tentang penentuan lokasi RTH publik dan standar-standar terkait penentuan lokasi RTH. Berikut merupakan rincian skoring pada masing-masing variabel.

A. Variabel Bukan Merupakan Kawasan Terbangun

Pada peta peruntukan lahan, penilaian atribut peta yang dilakukan yaitu pada seluruh kawasan yang terklasifikasi menjadi berikut:

- Skala 0 (tidak sesuai) : merupakan kawasan terbangun.
- Skala 1 (sesuai) : merupakan kawasan tak terbangun.

Luas hasil raster peruntukan lahan pada wilayah studi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Luas Kesesuaian Bukan Merupakan Kawasan Terbangun

No	Kesesuaian	Luas (Ha)
1	Sesuai	2175,274209
2	Tidak Sesuai	19108,194027

Untuk peta peruntukan lahan dapat dilihat pada gambar peta 4.11.

B. Variabel Harga Lahan

Pada peta harga lahan, penilaian atribut peta yang dilakukan yaitu pada seluruh kawasan yang terklasifikasi menjadi berikut:

- Skala 0 (tidak sesuai) : bukan merupakan harga lahan terendah
- Skala 1 (sesuai) : merupakan harga lahan terendah Luas kesesuaian hasil raster pada harga lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Luas Kesesuaian Harga Lahan

No	Kesesuaian	Luas (Ha)
1	Sesuai	71,072051
2	Tidak Sesuai	21212,780747

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta 4.12.

C. Variabel Jarak Terhadap Jalan Arteri

Pada peta kesesuaian jarak terhadap jalan arteri, pemberian nilai pada atribut peta dilakukan pada seluruh jalan arteri yang terdapat pada wilayah studi yang diklasifikasikan seperti berikut ini:

- Skala 0 (tidak sesuai) : Jarak terhadap jalan arteri >400 meter.
- Skala 1 (sesuai) : Jarak terhadap jalan arteri ≤ 400 meter.

Sebelum dilakukan analisis kesesuaian terlebih dahulu dilakukan *buffering* untuk mengetahui jarak terhadap jalan arteri.

Tabel 4.13 Luas Kesesuaian Jarak terhadap Jalan Arteri

No	Kesesuaian	Luas (Ha)
1	Sesuai	10060,71608
2	Tidak Sesuai	11223,121512

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Untuk lebih jelasnya dapa dilihat pada gambar peta 4.13.

D. Variabel Jarak Terhadap Pusat Kota

Pada peta kesesuaian jarak terhadap puisat kota pemberian nilai pada atribut peta dilakukan pada seluruh wilayah studi yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- Skala 0 (tidak sesuai) : >1000 meter.
- Skala 1 (sesuai) : ≤1000 meter

Sebelum dilakukan analisis kesesuian terlebih dahulu dilakukan *buffering* untuk mengetahui jarak terhadap pusat kota. Luasan kesesuaian jarak terhadap pusat kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan pada gambar peta 4.14.

Tabel 4.14 Luas Kesesuaian Jarak Terhadap Pusat Kota

No	Kesesuaian	Luas (Ha)
1	Sesuai	8827,604041
2	Tidak Sesuai	12456,233551

E. Variabel Kemiringan Lereng

Pada peta kesesuaian kemiringan lereng, pemberian nilai pada atribut peta dilakukan pada seluruh wilayah Kota Bekasi yang diklasifikasikan seperti berikut ini:

- Skala 0 (tidak sesuai) : Kemiringan lereng > 25%.
- Skala 1 (sesuai) : Berada pada kemiringan 0-25%

Luasan kesesuaian kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.15 Luas Kesesuaian Kemiringan Lereng

No	Kesesuaian	Luas (Ha)
1	Sesuai	1225,803074
2	Tidak Sesuai	20007,907436

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta 4.15.

F. Variabel Daerah Resapan Air

Pada peta kesesuaian terhadap daerah resapan air, pemberian nilai pada atribut peta dilakukan pada seluruh wilayah yang diklasifikasikan menjadi 2 kelas yaitu:

- Skala 0 (tidak sesuai) : Bukan daerah resapan air.
- Skala 1 (sesuai) : Merupakan daerah resapan air.

Tabel 4.16 Luas Kesesuaian Daerah Resapan Air

No	Kesesuaian	Luas (Ha)
1	Sesuai	5041,821942
2	Tidak Sesuai	16241,974115

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta 4.16.

G. Variabel Bukan Daerah Rawan Banjir

Pada peta kesesuaian bukan daerah rawan bencana banjir, pemberian nilai pada atribut peta dilakukan pada seluruh wilayah yang diklasifikan menjadi 2 kelas yaitu:

- Skala 0 (tidak sesuai) : Merupakan daerah rawan banjir.
- Skala 1 (sesuai) : Bukan daerah rawan banjir.

Tabel 4.17 Luas Kesesuaian Bukan Daerah Rawan Banjir

No	Kesesuaian	Luas (Ha)
1	Sesuai	17669,077972
2	Tidak Sesuai	3614,964113

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Peta kesesuaian bukan daerah rawan banjir dapat dilihata pada gambar peta 4.17.

H. Variabel Kepadatan Penduduk

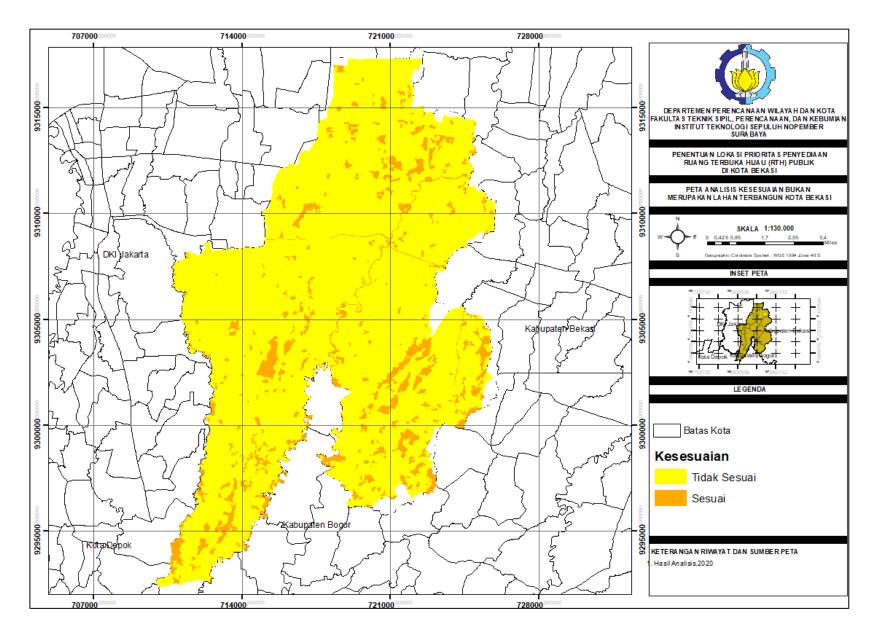
Pada peta kesesuaian terhadap kepadatan penduduk, pemberian nilai pada atribut peta dilakukan pada seluruh wilayah studi yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

- Skala 0 (tidak sesuai) : < 5000 jiwa/km².
- Skala 1 (sesuai) : > 5000 jiwa/km².

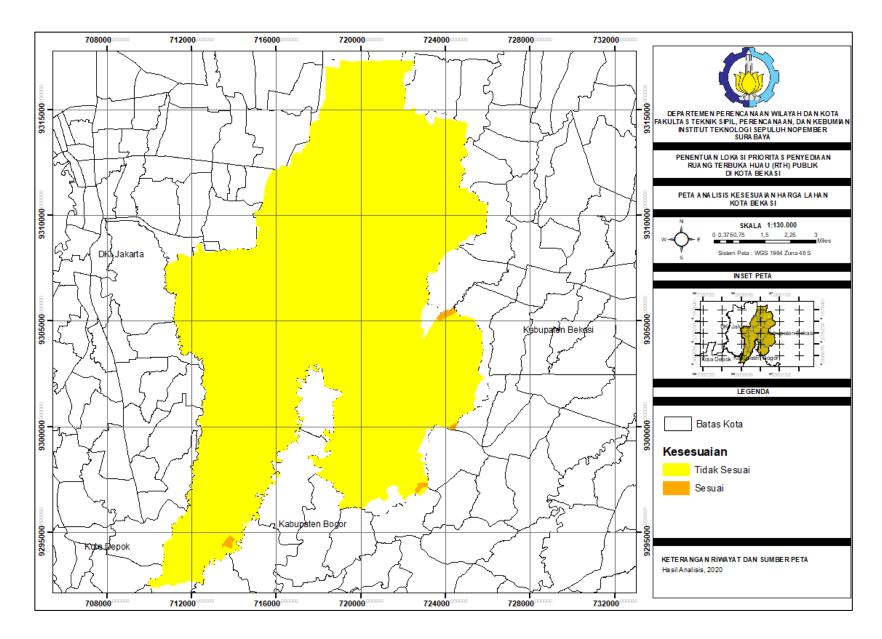
Tabel 4.18 Luas Kesesuaian Kepadatan Penduduk

No	Kesesuaian	Luas (Ha)
1	Sesuai	21284,072533
2	Tidak Sesuai	-

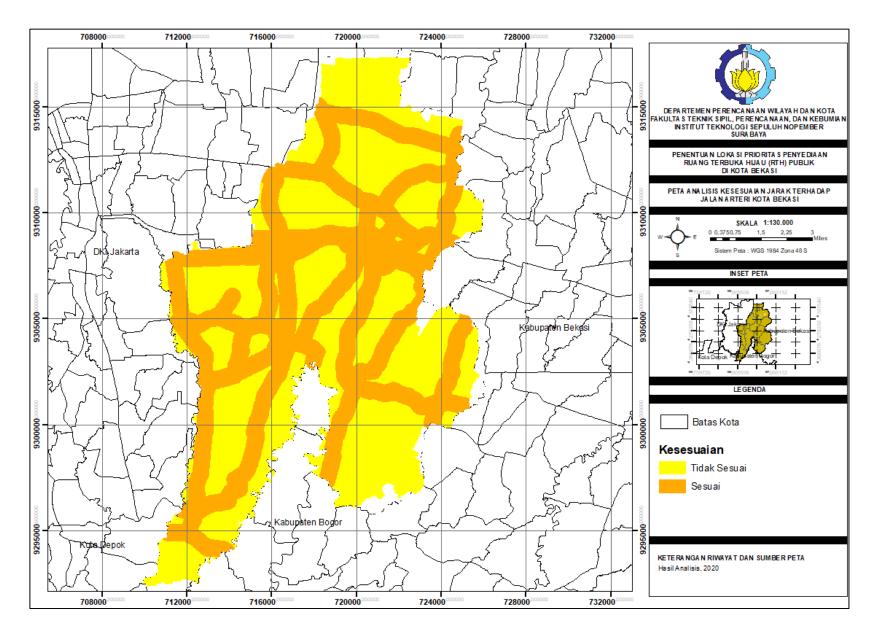
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta 4.18.



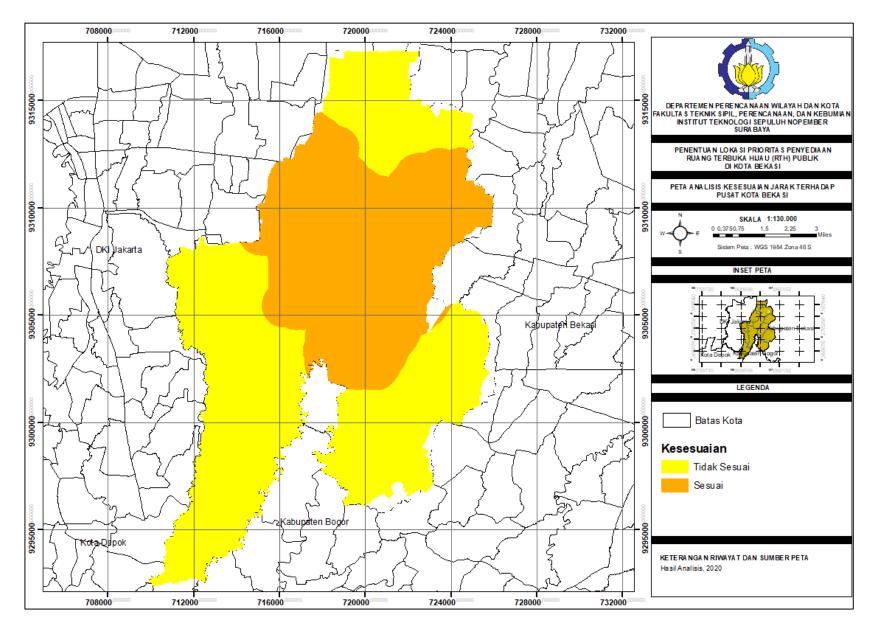
Peta 4.11 Kesesuian Bukan Merupakan Kawasan Terbangun



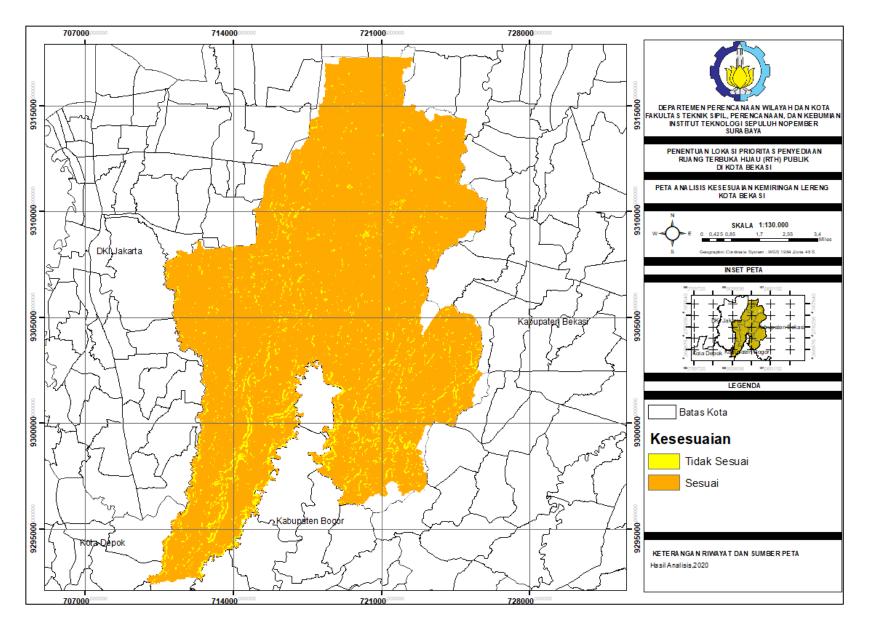
Peta 4.12 Kesesuian Harga Lahan



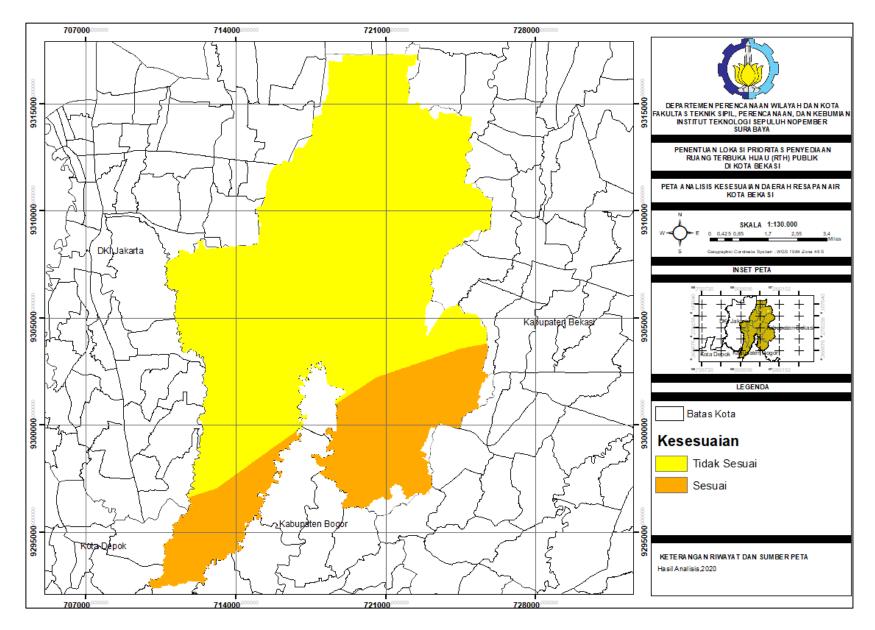
Peta 4.13 Kesesuian Kesesuaian Jarak Terhadap Jalan Arteri



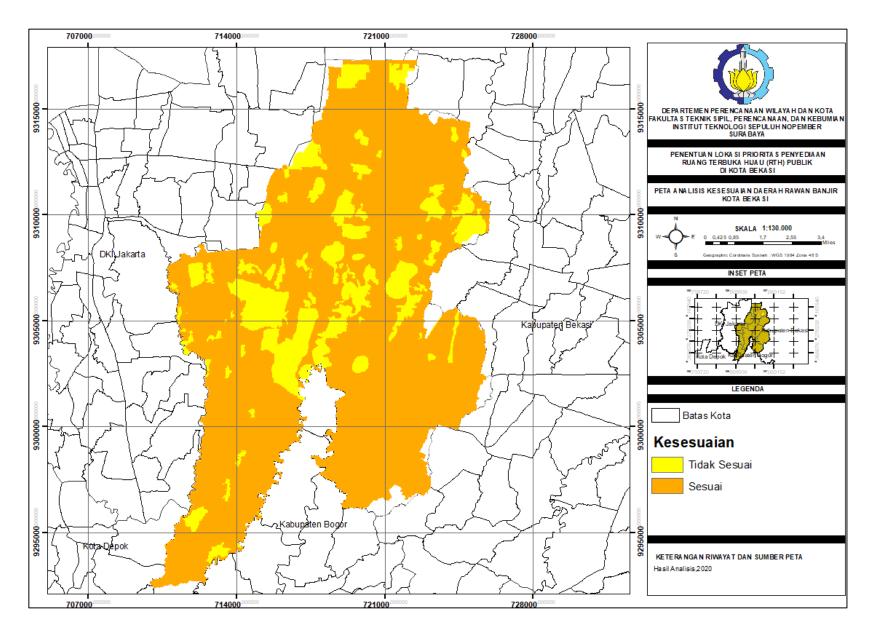
Peta 4.14 Kesesuaian Jarak Terhadap Pusat Kota



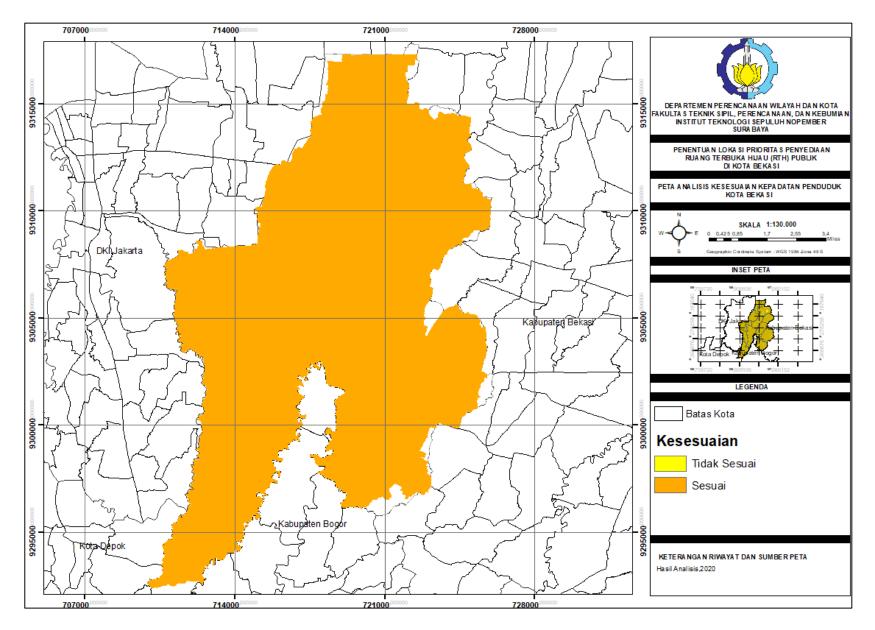
Peta 4.15 Kesesuaian Kemiringan Lereng



Peta 4.16 Kesesuaian Daerah Resapan Air



Peta 4.17 Kesesuian Bukan Daerah Rawan Banjir



Peta 4.18 Kesesuian Kepadatan Penduduk

Sumber: Hasil analisis, 2020

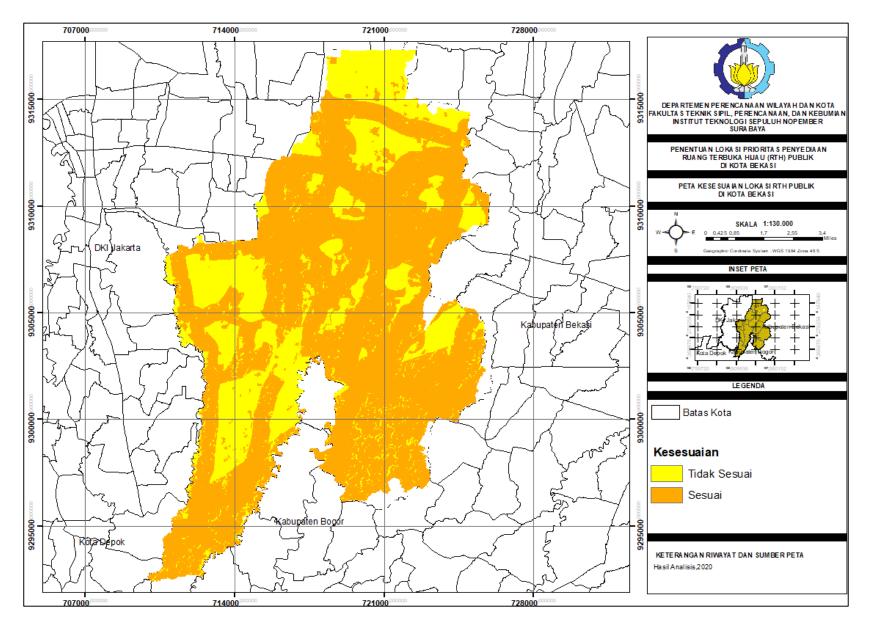
"Halaman ini Sengaja dikosongkan"

Setelah didapat peta kesesuaian pada setiap masing-masing varibel, selanjutnya, dilakukan analisis lebih lanjut dengan mengoverlay peta-peta diatas dengan menggunakan unit analisis weighted
sum. Hasil overlay tersebut menggambarkan bagaimana tingkat
kesesuaian lokasi berdasarkan masing-masing variabel yang sudah
didapatkan sebelumnya. Variabel dimasukkan berdasarkan rangking
bobot terbesar berdasarkan AHP, kemudian sesuai kelasnya maka
overlay dibagi menjadi 2 kelas yaitu, sesuai dan tidak sesuai. Bobot
yang digunakan pada peta kesesuaian ini adalah 1.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka didapatkan, dimana dari 8 faktor seharusnya lokasi rth yg sesuai adalah lokasi yg outputnya nilai maksimum 8. Namun tidak ditemukan dilokasi penelitian, adapun yg ditemukan hanya lokasi yang berskor 7 artinya lokasi tersebut memenuhi kriteria 7 faktor dari 8 faktor yang dianggap syarat lokasi rth, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran VI.

Untuk penentuan prioritas, tidak serta merta hanya pada lokasi yang paling sesuai tapi perlu dilakukan klasifikasi dari kesesuaian dengan rentang skor 1-3 untuk kelas sesuai dan 3-7 untuk kelas tidak sesuai. Hasilnya adalah sebagai berikut peta kesesuaian lokasi berdasarkan analisis kesesuaian pada setiap variabel seperti pada gambar 4.19, dari hasil yang didapatkan bahwa luas lahan yang sesuai sebesar 15177 Ha atau 72% dari luas wialayah Kota Bekasi dan yang tidak sesuai sebesar 6053 Ha atau 28% dari luas wilayah Kota Bekasi.

"Halaman ini Sengaja dikosongkan"



Peta 4.19 Kesesuaian Lokasi RTH Publik di Kota Bekasi

Sumber: Hasil analisis, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

4.3.2. Pembobotan pada lokasi berdasarkan Faktor RTH Publik Kota Bekasi

Pada tahap penentuan prioritas lokasi dilakukan analisis pembobotan dari hasil dari masing-masing pengkelasan pada variabel yang telah diketahui skala penilaiannya. Penilaian bobot berdasarkan bobot analitycs hierarchy process (AHP) yang sudah didapatkan pada sasaran 1, kemudian hasil bobot tersebut dikalikan dengan masing-masing variabel yang sudah diberikan nilai, selanjutnya dilakukan *overlay* dan dijumlahkan untuk melihat *range* nilai minimum dan maksimum berdasarkan hasil pembobotan pada seluruh lokasi RTH publik Kota Bekasi,

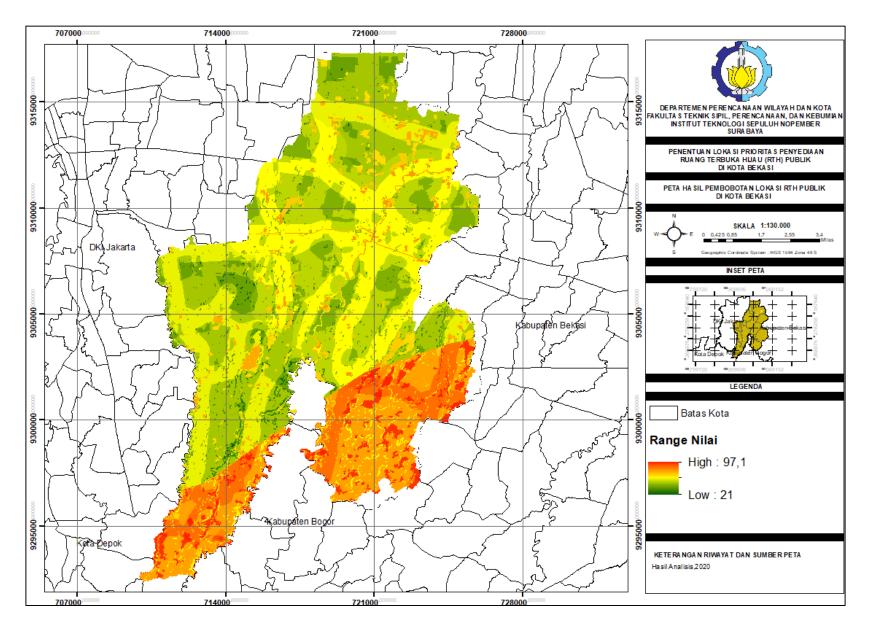
Untuk kebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan gambar peta 4.20

Tabel 4.19 Pembobotan Lokasi RTH Publik di Kota Bekasi

Indikator	Variabel	Nilai	Bobot		
A	В	С	D		
Penggunaan	Bukan Merupakan	1	15,9%		
Lahan	Lahan Terbangun	0	13,770		
Nilai Lahan	Harga Lahan	1	4,8%		
Miai Lanan	Harga Lanan	0	4,070		
	Kemiringan	1	14,2%		
	Lereng	0	14,270		
Fisik	Daerah Resapan	1	25,4%		
	Air	0	23,470		
		1	7,8%		

Indikator	Variabel	Nilai	Bobot		
A	В	C	D		
	Bukan Merupakan Daerah Rawan Banjir	0			
	Jarak Terhadap	1	8%		
Aksesibilitas	Jalan Arteri	0	670		
Aksesioiiitas	Jarak Terhadap	1	3%		
	Pusat Kota	0	3%		
Sosial	Kepadatan	1	21%		
Sosiai	Penduduk	0	2170		

Sumber: Hasil Analisis, 2020



Peta 4.20 Peta Hasil Pembobotan Pada Seluruh Lokasi untuk RTH Publik Kota Bekasi

Sumber: Hasil analisis, 2020

"Halaman ini Sengaja dikosongkan"

4.3.3. Penentuan prioritas lokasi untuk penyediaan RTH publik di Kota Bekasi

Setelah mendapatkan hasil pembobotan pada seluruh lokasi RTH publik di Kota Bekasi, maka selanjutnya dilakukan pengambilan data yang sudah terklarifikasi menggunakan *extract by mask* antara peta kesesuaian dengan peta hasil pembobotan lokasi RTH publik di Kota Bekasi, dalam melakukan *extract by mask* peta kesesuaian hanya dipilih lokasi yang sesuai untuk RTH publik. Sehingga dari hasil tersebut didapatkan *range* nilai pada lokasi yang sesuai untuk penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran VI

Selanjutnya dilakukan perangkingan, perangkingan ini dibagi menjadi 3 kelas yaitu bukan prioritas, kurang prioritas, dan prioritas. Berdasarkan pada gambar peta 4.20 didapatkan *range* nilai yang terendah yaitu 36,6 dan nilai tertinggi yaitu 97,1. Dari hasil persebaran nilai tersebut dilakukan perangkingan, luas persebaran dari data menggunakan sistem interval teratur seperti pada cara dibawah ini:

Range Kelas =
$$\frac{97,1-36,6}{3}$$
 = 20,16666666666667

Dari perhitungan luas persebaran untuk kelas intervalnya, maka didapatkan batas persebaran atau persebaran dari nilai total skornya sebagai berikut:

- 3. Untuk kelas interval yang ketiga didapatkan dari nilai lebih dari batas kelas interval kedua.

Hasil klasifikasi perangkingan dapat dilihat pada tabel 4.20 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta yang terdapat di lampiran VII dan Lampiran VIII.

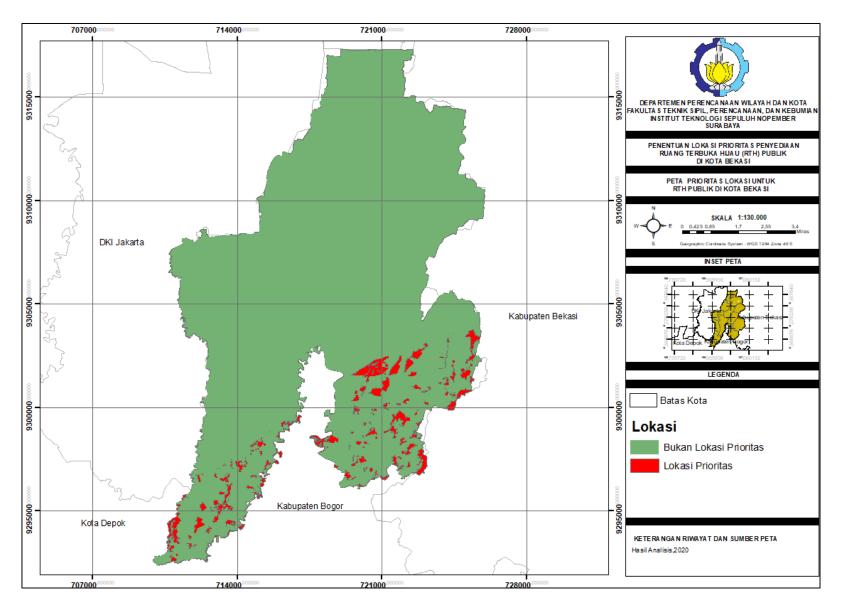
Tabel 4.20 Klasifikasi Prioritas Lokasi Penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi

No	Skor	Keterangan
1	36,59999847 - 56,76666667	Bukan Prioritas
2	56,76666668 - 76,93333333	Kurang Prioritas
3	76,93333334 - 97,09999847	Prioritas

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Dari hasil analisa perangkingan pada tabel diatas, didapatkan bahwa lokasi yang paling tepat untuk dijadikan prioritas lokasi RTH Publik di Kota Bekasi berada pada skor 76,93333334% - 97,09999847% atau yang dikategorikan prioritas berdasarkan kelas perangkingannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta 4.21.

"Halaman Sengaja Dikosongkan"



Peta 4.21 Prioritas Lokasi Untuk Penyediaan RTH Publik Di Kota Bekasi

Sumber: Hasil analisis, 2020

"Halaman Sengaja Dikosongkan"

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

- Pada sasaran pertama ditemukan faktor yang paling mempengaruhi terhadap dasar penentuan prioritas lokasi penyediaan RTH publik di Kota Bekasi, nilai pengaruh tersebut didapatkan berdasarkan pembobotan yang didapatkan dari hasil komparasi antar variabel. Adapun hierarki tingkat prioritas dari variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1. Daerah resapan air
 - 2. Kepadatan penduduk
 - 3. Bukan merupakan kawasan terbangun
 - 4. Kemiringan lereng
 - 5. Jarak terhadap jalan arteri
 - 6. Bukan daerah rawan banjir
 - 7. Harga lahan
 - 8. Jarak terhadap pusat kota
- 2) Pada sasaran kedua ditemukan lokasi yang sesuai untuk penyediaan RTH publik dengan nilai maksimum hanya sebesar 7 dari 8 faktor yang ada. Sehingga dilakukan klasifikasi dr kesesuaian dengan rentang skor 1-3 untuk kelas sesuai dan 3-7 untuk kelas tidak sesuai. Hasilnya bahwa luas lahan yang sesuai sebesar 15177 Ha dan yang tidak sesuai sebesar 6053 Ha.
- 3) Pada sasaran 3 didapatkan lokasi prioritas berdasarkan peta kesesuaian dan peta persebaran nilai pada lokasi RTH. Perangkingan prioritas lokasi dibagi menjadi 3 kelas yaitu, bukan prioritas, kurang prioritas dan prioritas. Berikut hasil klasifikasi dari tiap persebaran nilai yang didapat:

No	Skor	Keterangan
1	36,59999847 - 56,76666667	Bukan Prioritas
2	56,76666668 - 76,93333333	Kurang Prioritas
3	76,93333334 - 97,09999847	Prioritas

Sehingga berdasarkan tabel diatas lokasi prioritas terletak pada *range* nilai 76,93333334 %- 97,09999847%

4) Lokasi prioritas tersebar pada beberapa wilayah kelurahan di wilayah studi, yaitu kelurahan Ciketingudik, kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Cimuning, Kelurahan Pedurenan, Kelurahan Mustika Jaya, Keluraha Bantargebang, kelurahan Mustikasari, kelurahan tersebut berada pada kecamatan Bantargebang dan Mustikajaya,sedangkan kelurahan Jatikarya, kelurahan Jatisampurna, kelurahan Jatiraden, dan Kelurahan Jatirangga berada pada kecamatan Jatisampurna dan Jatiasih, dengan luas sekitar 860,20 Ha atau hanya sekitar 4,1% dari luas wilayah Kota Bekasi

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk membantu dalam pemilihan lokasi yang prioritas untuk pembangunan ruang terbuka hijau publik.
- 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan terkait penentuan jenis RTH Publik yang sesuai pada prioritas lokasi yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- SIWI, H. P., & Kurniawan, A. (2016). *Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Privat Di Kota Magelang* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Pambudi, B. P. (2015). *OPTIMALISASI PEMANFAATAN TAMAN KOTA OLEH MASYARAKAT KOTA BEKASI* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 68. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi jawa Barat (BAPPEDA Jabar). 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023. Bekasi.
- Yusnilaningsih, Riesty. (2019). *Bekasi Tak Sanggup Penuhi Ruang Terbuka Hijau 30%*. Diambil dari https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/05/05/bekasi-tak-sanggup-penuhi-ruang-terbuka-hijau-30 Diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.
- Cahya, D,dkk. (2016). Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bekasi. Jakarta: ResearchGate
- Nurhanafi, I, dkk. (2016). *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang*. Semarang: UNDIP
- Aftriana, Careca Virma. 2013. Analisis Perubahan Kerapatan Vegetasi Kota Semarang menggunakan Bantuan Teknologi Penginderaan Jauh. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang
- Carr, Stephen, dkk. 1992. *Public Space*, Cambridge University Press. USA
- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- Utami, M. R., & Susanti, R. (2019). *IDENTIFIKASI LOKASI POTENSIAL UNTUK PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK AKTIF DI KOTA SALATIGA. TATALOKA*, 21(3).

- Yanti, Fitri. (2016). KUALITAS RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS LAPANGAN MERAH DAN PASAR SENI, LAPANGAN KALPATARU DAN EMBUNG SUKARAME/TAMAN KOTA). Tesis. Lampung: Universitas Lampung.
- Angelia, T. (2017). Konsep Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai Fungsi Ekologis Penyerap Air Hujan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Daerah Kota Bekasi No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031*. Lembaran Daerah Tahun 2011, No. 13. Kota Bekasi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan
- Peraturan Menteri PU No. 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Neong, M. (1990). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta:* Rake Sarasin.
- Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Gramedia. Jakarta.
- Wicaksono, R. A., & Zuharnen, Z. (2017). Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Menentukan Lokasi Prioritas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta. Jurnal Bumi Indonesia, 6(3).
- N. Humaida. (2016). *Metode penentuan prioritas ruang terbuka hijau di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*. TESIS. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Norton, B. A., Coutts, A. M., Livesley, S. J., Harris, R. J., Hunter, A. M., & Williams, N. S. (2015). *Planning for cooler cities: A*

- framework to prioritise green infrastructure to mitigate high temperatures in urban landscapes. Landscape and urban planning, 134, 127-138..
- A. Andi Chairul. (2015). Analisis Kesesuaian Lokasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kecamatan Palu Timur Dan Palu Barat. Jurnal. Vol 1: (2). Palu. Universitas Tadulako.
- Manual Kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau Tahun 2017. (2017). 6th ed. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan, p.54.
- Achsan, A. (2015). Analisis Kesesuaian Lokasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kecamatan Palu Timur Dan Palu Barat. E-JURNAL ARSITEKTUR LANSEKAP, 1(2), pp.81-90.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I: DESAIN SURVEY PENELITIAN

No	Sasaran	Data	Sumber Data	Instansi Penyedia	Metode Pengumpulan Data	Teknik/Metode analisis	Output Analisis
1.	Merumuskan faktor-faktor utama dalam penentuan prioritas penyediaan	Kemiringan Lahan	Bappelitbangda Kota Bekasi dan Data DEM SRTM	Bappelitbangda dan USGS	Survey Sekunder	Analytics Hierarchy Process (AHP)	Faktor utama dalam penentuan prioritas lokasi penyediaan RTH publik
	RTH Publik di Kota Bekasi	Daerah Resapan air	Data Hidrologi Kota Bekasi	PDAM Kota Bekasi dan Bappelitbangda Kota Bekasi	Survey sekunder		

No	Sasaran	Data	Data Sumber Data Instansi Penyedia		Metode Pengumpulan Data	Teknik/Metode analisis	Output Analisis
		RTH Publik eksisting Harga Lahan	Data Luas dan capaian RTH Publik eksisting Kota Bekasi Data NJOP Dan Peta online	Distaru Kota Bekasi dan DLH Kota Bekasi Kecamatan Seluruh Bekasi	Survey Sekunder dan Survey Primer Survey Sekunder		
		Rencana Pola Ruang	atrbpn Shp rencana Pola Ruang RTRW 2011- 2031 Kota Bekasi	dan bpn.go.id Bappelitbangda Kota Bekasi	Survey Sekunder		

No	Sasaran	Data	Sumber Data	Instansi Penyedia	Metode Pengumpulan Data	Teknik/Metode analisis	Output Analisis
		Penggunaan Lahan	Shp Peta Penggunaan lahan eksisting	Bappelitbangda Kota Bekasi, Dinas Tata ruang, Citra Satelit	Survey Sekunder		
		Daerah Rawan Banjir	Peta Rawan Bencana RTRW	Bappelitbangda	Survey		
		Daerah Rawan Longsor	2011-2031	Kota Bekasi	Sekunder		
		Jumlah Penduduk	Data Jumlah penduduk per kecamatan	BPS Kota Bekasi	Survey sekunder		

No	Sasaran	Data	Sumber Data	Instansi Penyedia	Metode Pengumpulan Data	Teknik/Metode analisis	Output Analisis
		Kepadatan Penduduk					
		Hierarki Jalan	Tatralog dan SHP jaringan jalan Kota Bekasi	Dishub Kota Bekasi dan BMSDA Kota Bekasi	Survey Sekunder		
2	Menganalisis kesesuaian lokasi untuk penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi	Variabel Penelitian dalam Sintesa Pustaka	Jurnal,Peraturan- peraturan, peneliti terdahulu	-	-	Weighted Sum	Kesesuaian lokasi untuk penyediaan RTH Publik

No	Sasaran	Data	Sumber Data	Instansi Penyedia	Metode Pengumpulan Data	Teknik/Metode analisis	Output Analisis
3.	Menentukan prioritas lokasi RTH Publik di Kota Bekasi	Bobot dari masing- masing faktor prioritas untuk penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi	Output sasaran 1 dan 2	-	-	Weighted Sum	Prioritas Lokasi RTH Publik Di Kota Bekasi

LAMPIRAN II: FORM KUISIONER AHP



GANIDA BIMA GHOFARA
08211640000096
DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN, DAN
KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

Dengan Hormat

Saya Ganida Bima mahasiswa ITS yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir. Penelitian ini terkait dengan penentuan prioritas lokasai untuk penyedian RTH publik di Kota Bekasi. Kuisioner ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor prioritas berdasarkan pembobotan yang Bpk/Ibu isi untuk nantinya dijadikan sebagai acuan untuk arahan penyediaan prioritas lokasi di Kota Bekasi.

Atas bantuan dan kerjasamanya saya sampaikan terimakasih,

Hormat Saya, Ganida Bima Ghofara

KUISIONER PENENTUAN PRIORITAS LOKASI UNTUK PENYEDIAAN RTH PUBLIK DI KOTA BEKASI

Nama: Dinas/Jabatan: Foto		_
I I	Foto	

Petunjuk pengisian kuisioner:

Dalam kuisioner ini, Bapak/Ibu diminta untuk memberi nilai untuk menentukan tingkat kepentingan pada faktor penentuan prioritas lokasi penyediaan RTH publik. Nilai tersebut berupa skala 1-9. Dengan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Keterangan
1	Kriteria A sama pentingnya dengan kriteria B
3	Kriteria A sedikit lebih penting dari pada kriteria B
5	Kriteria A cukup penting daripada kriteria B
7	Kriteria A sangat penting daripada kriteria B
9	Kriteria A mutlak penting dari pada kriteria B
2,4,6,8	Apabila ragu antar dua nilai pertimbangan yang berdekatan

Contoh Pengisian:

Jika harga lahan cukup penting dari Kemiringan Lereng, maka nilai yang diberikan adalah 5

Penyebab		Bobot										Penyebab						
Harga Lahan	9	R	7	6	4	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan
Tanga Lanan		0	,		•	7	3		1	_	3	"	3	U	′	U		Lereng

PAIRWISE COMPARISON

Kriteria Utama Penentuan Lokasi Prioritas RTH Publik

Penyebab								F	Bobo	ot								Penyebab
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Harga Lahan
Kawasan Terbangun																		(rendah)
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan
Kawasan Terbangun		O	,	U	3	۲	٦	1	1	1	٦	۲	3	0	,	0	,	Arteri (≤ 400 meter)
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap
Kawasan Terbangun)	0	'	0	5	+	5	2	1		3	4	5	U	,	0	9	Pusat Kota (1000 m)
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng
Kawasan Terbangun	9	0	'	U	5	4	3	2	1	2	3	4	5	U	/	8	9	(kemiringan 0-25%)
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Kawasan Terbangun	9	0	'	U	5	4	3	2	1	2	3	4	5	U	/	0	9	Daeran Kesapan An
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan
Kawasan Terbangun	9	0		0	3	4	3	2	1	2	3	4	3	O	/	0	9	Banjir
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Kawasan Terbangun	9	0	'	0	3	4	3	2	1	2	3	4	3	O	/	0	9	Kepadatan Fenduduk
Harga Lahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan
(rendah)	9	0	,	U	3	4	3		1	2	3	4	3	U	,	0	9	Arteri (≤ 400 meter)

Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk

Jarak Terhadap Jalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan
Arteri (≤ 400 meter))	0	,	U)	4)		1		3	4	5	U	,	0	9	Arteri (≤ 400 meter)
Jarak Terhadap Jalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap
Arteri (≤ 400 meter)	9	0	/	O)	4	3	2	1		3	4	3	O	/	0	9	Pusat Kota (1000 m)
Jarak Terhadap Jalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng
Arteri (≤ 400 meter)	9	0	,	O)	4	3	2	1		3	4	3	O	,	0	9	(kemiringan 0-25%)
Jarak Terhadap Jalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Arteri (≤ 400 meter)	9	0	/	O)	4	3	2	1		3	4	3	O	/	0	9	Daeran Kesapan An
Jarak Terhadap Jalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan
Arteri (≤ 400 meter)	9	0	/	0	3	4	3		1	2	3	4	3	0	/	0	9	Banjir
Jarak Terhadap Jalan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Arteri (≤ 400 meter))	0	,	U)	4)		1		3	4	5	U	,	0	9	Kepadatan Fenduduk
Jarak Terhadap Pusat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng
Kota (1000 m))	0	,	U)	4)		1		3	4	5	U	,	0	9	(kemiringan 0-25%)
Jarak Terhadap Pusat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Kota (1000 m)	9	0	/	O)	4	3	2	1		3	4	3	O	/	0	9	Daeran Kesapan An
Jarak Terhadap Pusat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan
Kota (1000 m)	9	0	/	O	3	4	3		1	2	3	4	3	O	/	0	9	Banjir
Jarak Terhadap Pusat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Kota (1000 m)		0				4			1		٥	4	<i></i>			0	<i>J</i>	Kepadatan Penduduk

Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Rawan Banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk

LAMPIRAN III: ANALISIS STAKEHOLDERS LAMPIRAN III.I: TABEL PENILAIAN STAKEHOLDERS

Stakeholder	Pengaruh	Dampak (+)/(-)	Kepentingan (1-5)	Pengaruh (1-5)
Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab dalam penyediaan RTH publik	+	5	5
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	Terlibat dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup	+	5	5
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi	Sebagai pihak yang yang turut berkoordinasi dalam pengawasan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan RTRW	+	5	5
Dinas BMSDA	Sebagai pihak yang berwenang dalam menyusun program dan melaksanakan pengawasan dalam bidang penyediaan infrastruktur.	+	4	4
Pihak Kecamatan	Sebagai pihak yang mengerti kondisi eksisting kawasan	+	3	3

Stakeholder	Pengaruh	Dampak (+)/(-)	Kepentingan (1-5)	Pengaruh (1-5)
Akademisi	Memiliki pemahaman terhadap faktor-faktor lokasi RTH public dalam segi teoritis	+	5	4

Sumber: Penulis, 2019

Keterangan:

Dampak	Kepentingan	Pengaruh
(+) Dampak Postitif	1. Tidak Penting	1. Tidak Berpengaruh
(0) Tidak Berdampak	2. Sedikit Penting	2. Sedikit Berpengaruh
(-) Dampak Negatif	3. Cukup Penting	3 Cukup Berpengaruh
	4. Penting	4 Berpengaruh
	5. Sangat Penting	5 Sangat Berpengaruh

LAMPIRAN IV: FORM HASIL KUISIONER PARA STAKEHOLDER

KUISIONER PENENTUAN PRIORITAS LOKASI UNTUK PENYEDIAAN RTH PUBLIK DI KOTA BEKASI

Nama : Yowaldi, ST., MT.

Dinas/Jabatan : Bappelitbangda/ Kasi II Pengembangan wilayah



PAIRWISE COMPARISON

Penyebab								F	Bobo	ot								Penyebab
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Harga Lahan (rendah)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	<mark>7</mark>	8	9	Daerah Resapan Air
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<u>5</u>	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)

Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)

Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Rawan Banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk

KUISIONER PENENTUAN FAKTOR PRIORITAS LOKASI UNTUK PENYEDIAAN RTH PUBLIK DI KOTA BEKASI

Nama : Rini Wijayanti.

Dinas/Jabatan : Dinas Lingkungan Hidup/Kasi Inventarisasi RPBLH

dan KLHS

Foto

Penyebab								F	Bobo	ot								Penyebab
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Harga Lahan (rendah)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)

Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	<mark>7</mark>	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)

Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<u>5</u>	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Daerah Resapan Air	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Rawan Banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk

KUISIONER PENENTUAN PRIORITAS LOKASI UNTUK PENYEDIAAN RTH PUBLIK DI KOTA BEKASI

Nama : Neni Fitriani dan Wahab

Dinas/Jabatan : Dinas Tata Ruang Kota Bekasi/Kasi II Pelaksana

Perencanaan dan Staff Ahli Pemetaan dan

Pengendalian



Penyebab								F	Bobo	ot								Penyebab
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Harga Lahan (rendah)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	<u>5</u>	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	<u>5</u>	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)

Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)

Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<u>5</u>	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<u>5</u>	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Rawan Banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<u>5</u>	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk

KUISIONER PENENTUAN PRIORITAS LOKASI UNTUK PENYEDIAAN RTH PUBLIK DI KOTA BEKASI

Nama : Eddy Supriadi

Dinas/Jabatan : Bina Marga dan Sumber Daya Air/ Kasi I Taman

dan PJU



Penyebab								F	Bobo	ot								Penyebab
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Harga Lahan (rendah)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	<mark>6</mark>	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)

Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	<mark>6</mark>	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	<mark>4</mark>	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)

Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Rawan Banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	<mark>6</mark>	7	8	9	Kepadatan Penduduk

KUISIONER PENENTUAN PRIORITAS LOKASI UNTUK PENYEDIAAN RTH PUBLIK DI KOTA BEKASI

Nama : Ir. Iwan Ismaun

Dinas/Jabatan : Akademisi Arsitektur Lansekap Trisakti



	~ 01																	
Penyebab								F	Bobo	t								Penyebab
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Harga Lahan
Kawasan Terbangun	9	0	'	U)	4)		1	2	3	4	5	U	,	0	9	(rendah)
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan
Kawasan Terbangun)	0	<i>'</i>	U)	4	3		1	2	3	4	<mark>ی</mark>	U	,	0	9	Arteri (≤ 400 meter)
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap
Kawasan Terbangun)	0	<i>'</i>	U	<mark>-</mark>	4	3		1	2	3	4	3	U	,	0	9	Pusat Kota (1000 m)
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng
Kawasan Terbangun	9	0	/	U	<mark>-></mark>	4)		1	2	3	4	5	U	,	0	9	(kemiringan 0-25%)
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Kawasan Terbangun)	0	'	0)	4)		1		<u> </u>	4	5	U	,	0	9	Daeran Resapan An
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan
Kawasan Terbangun		0	,	U	3	7	3	4	1	4	٦	Ť	3	0	,	O	,	Banjir
Bukan Merupakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Kawasan Terbangun		0	<i>'</i>			7)	2	1		<u> </u>	7	3	U	,	0		Repadatan Tenduduk
Harga Lahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan
(rendah))	0	'	0)	4)		1		3	4	5	U	,	0	9	Arteri (≤ 400 meter)
Harga Lahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap
(rendah)		U	'			-		_	1		5	_)	U	,	0		Pusat Kota (1000 m)

Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)

Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<u>5</u>	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Rawan Banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk

KUISIONER PENENTUAN PRIORITAS LOKASI UNTUK PENYEDIAAN RTH PUBLIK DI KOTA BEKASI

Nama : Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP

Dinas/Jabatan : Akademisi SAPPK ITB

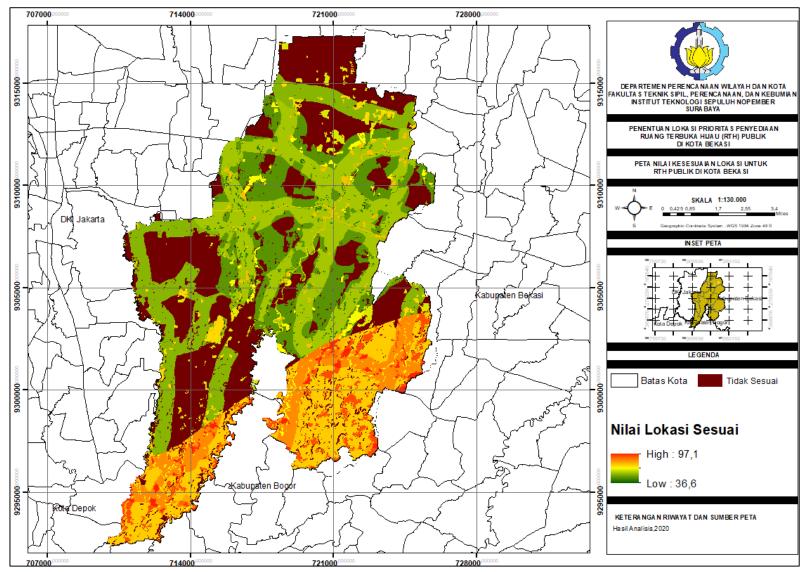


Penyebab		Bobot														Penyebab		
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Harga Lahan (rendah)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Bukan Merupakan Kawasan Terbangun	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)

Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Harga Lahan (rendah)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	<mark>7</mark>	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	<mark>5</mark>	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Jalan Arteri (≤ 400 meter)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)

Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Jarak Terhadap Pusat Kota (1000 m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	<mark>7</mark>	8	9	Kepadatan Penduduk
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Resapan Air
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Kemiringan Lereng (kemiringan 0-25%)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daerah Rawan Banjir
Daerah Resapan Air	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk
Daerah Rawan Banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	<mark>5</mark>	6	7	8	9	Kepadatan Penduduk

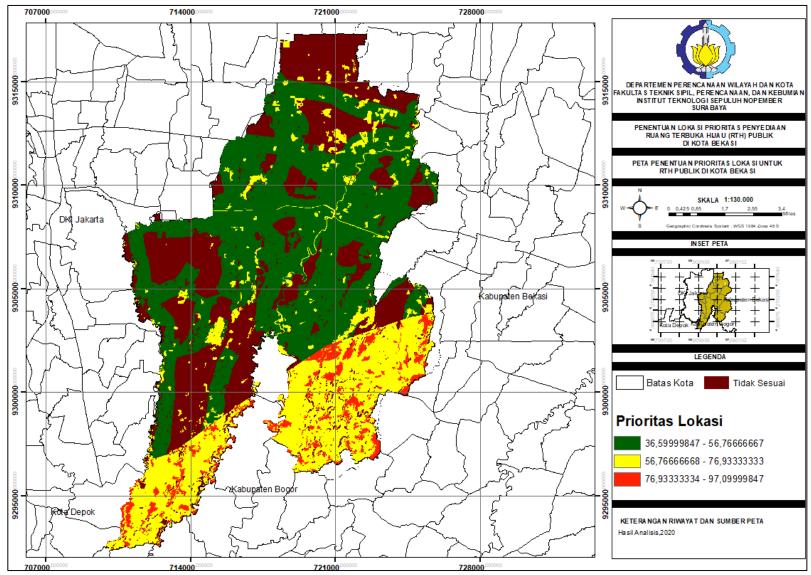
LAMPIRAN V



Peta 1. Nilai terhadap kesesuaian lokasi RTH Publik di Kota Bekasi

Hasil Analisis, 2020

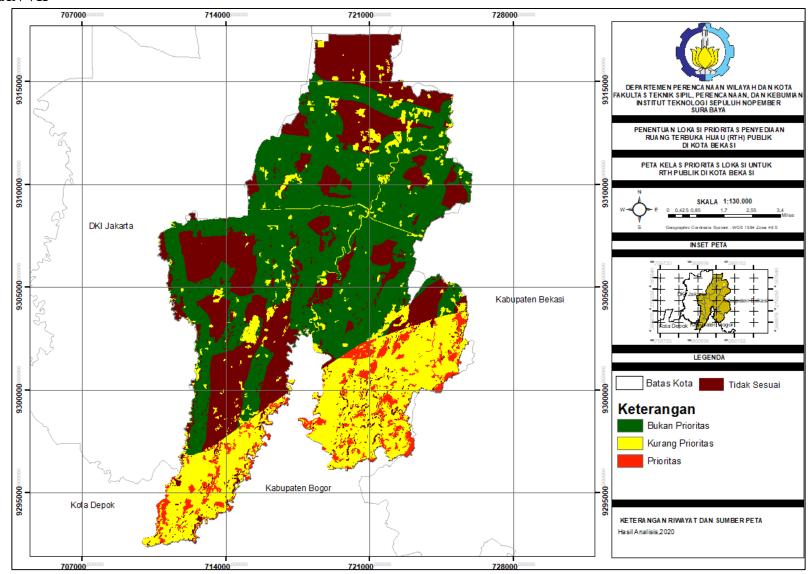
LAMPIRAN VI



Peta 2. Penentuan Nilai Prioritas Lokasi RTH Publik di Kota Bekasi

Hasil Analisis, 2020

LAMPIRAN VII



Peta 3. Penentuan Prioritas Lokasi RTH Publik di Kota Bekasi

Hasil Analisis, 2020



BIODATA PENULIS

Penulis dengan nama Ganida Bima Ghofara lahir Bekasi.23 Januari 1997. Terlahir anak ketiga dari tiga Penulis bersaudara. pendidikan menempuh formal di SDI Al-Azhar 9 Kemang Pratama (2003 -2009), SMP Negeri 252 Jakarta Timur (2009-2012),

dan SMA Negeri 2 Kota Bekasi (2012-2015). Kemudian penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri di Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 2016. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi kemahasiswaan. Riwayat organisasi mahasiswa penulis yaitu, Staff Hubungan Luar HMPL ITS (2017-2018), Kepala Departemen Hubungan Luar HMPL ITS (2018-2019), Staff Medsi BEM FADP (2018-2019), Staff Ahli Departemen ITS OPEN UKM Tennis Lapangan ITS (2017-2018). Selain itu penulis di aktif berkontribusi beberapa kepanitiaan baik lingkup himpunan, fakultas, kampus, dan luar kampus. Pada masa perkuliahan penulis pernah melakukan Kerja Praktek di Kementerian Bappenas/PPN selama 3 bulan. Besar harapan dari penulis terhadap kebermanfaatan tugas akhir ini, maka dari itu jika ada kritik/saran membangun jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi penulis melalui email, gghofara@gmail.com.